



POLITIK PENCITRAAN PKS DALAM PILGUB JABAR 2018

# POLITIK PENCITRAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS DALAM PILGUB JABAR 2018

Khoiruddin Muchtar  
Aliyudin  
Hamzah Turmudi



Khoiruddin Muchtar  
Aliyudin  
Hamzah Turmudi

ISBN 978-623-6524-03-9 (PDF)

9 786236 524039

POLITIK PENCITRAAN PKS  
DALAM PILGUB  
JABAR 2018



Jurusan Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Redaksi: Gedung Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Lt 2. Ruang Jurusan Manajemen Dakwah  
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung  
Telepon : 022-7810788 Fax : 0227810788  
E-mail : md@uinsgd.ac.id  
Website : http://md.uinsgd.ac.id

**POLITIK PENCITRAAN PKS DALAM PILGUB  
JABAR 2018**

**Khoirudin Muchtar  
Aliyudin  
Hamzah Turmudi**



**Uin**

**Jurusan Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

## **Politik Pencitraan PKS dalam Pilgub Jabar 2018**

### **Penulis :**

Khoirudin Muchtar  
Aliyudin  
Hamzah Turmudir

ISBN: 978-623-6524-03-9

### **Editor:**

Asep Iwan Setiawan  
Rohmanur Aziz

### **Penerbit:**

Jurusan Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **Redaksi:**

Gedung Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Lt 2. Ruang Jurusan Manajemen Dakwah  
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung  
Telepon : 022-7810788  
Fax : 0227810788  
E-mail : [md@uinsgd.ac.id](mailto:md@uinsgd.ac.id)  
Website : <http://md.uinsgd.ac.id>

Cetakan pertama, Januari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan naskah disertasi ini. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah sukses menjadi mediator penyampaian pesan-pesan kebenaran Allah kepada umat manusia. Semoga peneliti tetap konsisten mengikuti suri tauladannya. Amien.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan terhadap fenomena Partai Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam yang dikenal Konsisten dengan keislaman dan perjuangan untuk keadilan, walaupun saat ini PKS juga sedang menghadapi beberapa persoalan terkait dengan soliditas partai dan munculnya beberapa kader yang tersangkut korupsi. PKS berusaha membangun kembali citra partai agar mendapatkan kesetaraan dengan lain sebagai partai reformis.

Partai yang memiliki latar belakang pengajian kampus ini memang memiliki ciri khas keislaman untuk kalangannya, namun saat ini PKS sudah mulai membuka diri dengan golongan bahkan dengan agama lain. Dalam setiap momen Pilkada, PKS menerima koalisi dengan partai apa saja, asalkan selaras dengan platform dan visi misi PKS. Pada Pilgub Jabar 2018, PKS berkoalisi dengan PAN dan Gerindra.

Pada Pilkada tahun 2018 ini PKS hanya sebagai *runner up*, namun suara PKS jauh diluar prediksi yang telah dilansir lembaga-lembaga survey. PKS sebelumnya berhasil memenangkan Pilgub Jabar selama dua kali kepemimpinan yang dijabat oleh Ahmad Heryawan.

PKS sendiri di Jawa Barat ini bukanlah partai pemenang dalam Pemilu, namun dalam setiap Pilgub Jabar selalu mendapatkan suara signifikan. Sehingga bagi peneliti ini dianggap sebagai hal yang unik dan menarik untuk diteliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah public relations politik yang dilakukan para fungsionaris PKS, bagaimanakah mereka melakukan pendekatan terhadap pihak internal dan eksternal partai dan Alhamdulillah penelitian ini pada akhirnya dapat diselesaikan.

Peneliti sadar sepenuhnya, bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada para Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat dan Kabupaten/Kota yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan para pimpinan dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program penelitian ini. Begitu juga kepada Bapak Dekan dan paraWadek, teman-teman Dosen dan Pegawai TU di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis, sehingga terwujudnya hasil penelitian ini.

Peneliti menyadari, dengan selesainya penulisan laporan ini bukan berarti berakhirnya perbaikan, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan semoga semua yang membantu terselesaikannya penelitian ini dibalas oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Amien.

Bandung, 13 Januari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR   | iii     |
| DAFTAR ISI   | v       |
| <br>   |         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |         |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian .....   | 1       |
| 1.2. Kajian Tentang PKS .....  | 5       |
| 1.3. Kajian Teoretis dan Konseptual .....  | 9       |
| 1.4. Kerangka Pemikiran .....  | 32      |
| 1.5. Metodologi .....  | 33      |
| <br>   |         |
| <b>BAB II. GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN<br/>SEJAHTERA</b>                             |         |
| 2.1. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera .....                                   | 41      |
| 2.2. Struktur Organisasi dan Pengurus PKS .....  | 45      |
| 2.3. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera .....   | 49      |
| 2.4. Platform Partai Keadilan Sejahtera .....  | 49      |
| <br>   |         |
| <b>BAB III. <i>PUBLIC RELATIONS</i> POLITIK INTERNAL<br/>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b> |         |
| 3.1. Membangun Kebersamaan dan Soliditas di Internal Partai ..                         | 55      |
| 3.2. Saluran Komunikasi di Internal Partai Keadilan Sejahtera ..                       | 66      |
| <br>   |         |
| <b>BAB IV. <i>PUBLIC RELATIONS</i> POLITIK EKSTERNAL<br/>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b> |         |
| 4.1. Membangun Citra Positif Partai.....   | 69      |
| 4.2. Pencitraan dan Tantangan Partai Keadilan Sejahtera .....                          | 73      |
| 4.3. Perbaikan Citra Partai Keadilan Sejahtera .....                                   | 76      |
| 4.4. Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera .....                               | 79      |

|  |     |
|--|-----|
| 4.5. Membangun Koalisi dengan Partai Lain .....  | 82  |
| 4.6. Kriteria Calon Gubernur Partai Keadilan Sejahtera .....                                   | 89  |
| <b>BAB V. MEDIA <i>RELATIONS</i> PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>                                 |     |
| 5.1. Citra Partai Keadilan Sejahtera di Media .....  | 93  |
| 5.2. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memelihara<br>Hubungan Positif dengan Media..... | 96  |
| 5.3. Pemanfaatan Media Sosial dalam Membentuk Opini .....                                      | 98  |
| <b>BAB VII. SIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>   |     |
| 6.1. Simpulan.....   | 107 |
| 6.2. Rekomendasi .....   | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 112 |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>  |     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sepanjang kurun waktu 1998-2005, PKS merupakan kelompok fundamentalis, yang berkembang di kalangan menengah perkotaan, namun berbeda dari kelompok Islam modernis lainnya seperti Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Sebagai salah satu partai yang berlaga di dalam pemilu di Indonesia, PKS tetap setia dengan pandangan Islam fundamentalisnya, akan tetapi menunjukkan pandangan moderat dalam berbagai hal. fundamentalisme moderat setuju untuk bersikap kooperatif dan kompromi terhadap pihak lain sejauh kepentingan dan tujuan politik mereka juga terakomodasi. fundamentalis moderat cenderung setuju dengan demokrasi, karena dengan demokrasilah mereka bisa eksis, dan memberikan ruang untuk sebuah pemerintahan yang populer berdasarkan nilai-nilai Islam(Firman, 2007).

Berdasarkan fenomena tersebut, keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin bagi sebuah partai politik yang memiliki ideologi religius untuk meliberalisasi dan menghibur demokrasi, mungkin karena PKS tidak memiliki pilihan selain melakukan negosiasi dan berinteraksi dengan aktor politik lainnya melalui koalisi dan politik parlementer, bahkan dituntut untuk memperluas pemilihnya hingga menjangkau pemilih non-Islam (Hasan, 2012).

Kesediaan untuk menerima demokrasi, masuk di parlemen dan berkompetisi memperebutkan segmen politik non-Islam, menunjukkan bahwa, PKS sama sekali bukanlah ancaman bagi demokrasi. PKS percaya bahwa prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam Islam dan konteks Indonesia. Bagi PKS, demokrasi membuka ruang kesempatan bagi partai politik Islam untuk mencapai tujuan politiknya (Nurdin, 2011). PKS sudah lama membuka diri dan melakukan perubahan ke arah yang lebih komunikatif dengan kelompok lain, sehingga muncul beberapa pemimpin daerah yang berasal dari kader PKS.

Partai Keadilan Sejahtera selama ini sering memunculkan kader-kader yang mempunyai kemampuan yang dapat membawa perubahan, di beberapa daerah, partai keadilan sejahtera juga berhasil mengusung orang-orangnya menjadi pemimpin di



tingkat daerah (Utomo & Turtiantoro, 2013). PKS Jawa Barat termasuk yang telah berhasil mengusung dan menempatkan kadernya menjadi Gubernur Jawa Barat selama dua periode berturut-turut, padahal PKS sendiri bukan partai pemenang dalam dalam Pemilu Legislatif di Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan suatu daerah yang memiliki potensi besar untuk mendulang suara pemilih. Jawa Barat memiliki posisi strategis, terutama dari segi wilayah yang memiliki akses terdekat ke pemerintahan pusat. Semua partai politik berupaya menyusun strategi untuk meraih kemenangan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pilkada serentak di 16 daerah pada 2018 mendatang. Posisi Gubernur Jawa Barat sangat diperhitungkan oleh semua partai politik, karena diprediksi akan menyokong keberadaan partai pendukung tersebut.

Masyarakat Jawa Barat secara umum merupakan masyarakat yang paling siap berdemokrasi, dibuktikan dengan hasil Pemilu yang selalu berubah dan dinamis. Masyarakat Jawa Barat cenderung memilih parpol yang memiliki program realistis. Di daerah ini tidak pernah ada parpol yang menguasai secara mutlak dulu pernah menjadi pemenang, kemudian PDIP dan berikutnya adalah Demokrat (Bainus, 2017).

Uniknya, Parpol pemenang Pemilu di Jawa Barat belum tentu bisa memenangkan calon yang diusungnya. Terbukti selama periode ini yang menjadi Gubernur adalah Ahmad Heryawan, bukan dari partai pemenang Pemilu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menempati urutan keempat raihan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 untuk DPR wilayah di Jawa Barat, Padahal pada tahun 2013 PKS memenangkan Pilgub Jawa Barat dengan mengusung Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar

Suara PKS di Jawa Barat tidak pernah signifikan, keberadaan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat tidak berdampak besar bagi suara PKS. walaupun PKS menang dua kali pada dua kali Pilgub, itu bukan karena faktor Aher melainkan wakil Gubernurnya, Deddy Mizwar, sedangkan kemengan sebelumnya karena ada Dede Yusuf(Bainus, 2017). Fenomena tersebut mengisyaratkan, bahwa semua calon yang diusung partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama tergantung dari kemampuan dalam membangun komunikasi dan jaringan dengan tokoh dan masyarakat Jawa Barat.

Fenomena keberhasilan PKS dalam memenangkan Pilkada Gubernur Jawa Barat dua kali berturut-turut menjadi hal yang menarik untuk dikaji, terutama dari aspek strategi public relations yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera sehingga bisa mendapatkan simpati masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan fenomena tersebut, fokus kajian ini bertujuan untuk mengungkap tentang, strategi public relations politik PKS dalam memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sehingga diperoleh gambaran tentang manajemen image dan media, komunikasi Internal dan eksternal, serta memperoleh gambaran mengenai manajemen Informasi Partai Keadilan Sejahtera

Berdasar latar belakang penelitian tersebut, maka fokus kajian ini akan berupaya menjelaskan tentang, bagaimanakah strategi public relations politik partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana komunikasi Politik Internal Partai keadilan sejahtera dalam membangun Nilai Kebersamaan dan saluran-saluran Komunikasi serta strategi Komunikasi Politik Internal Partai keadilan sejahtera dalam Membentuk Opini Publik. Komunikasi Politik Eksternal Partai keadilan sejahtera dalam membangun Citra Positif Partai, membentuk Daya Tawar Positif dengan Partai Lain, serta bagaimana Identitas Partai dan Kriteria Calon Kepala Daerah Partai keadilan sejahtera Menjelang Pemilihan Kepala Daerah, serta dikaji pula tentang media relations Partai keadilan sejahtera dalam membangun citra partai, menentukan strategi dalam Memelihara Hubungan Positif dengan Media, serta pemanfaatan media sosial dalam membentuk opini calon kepala daerah.

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat baik secara akademik dan praktis. Manfaat secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi, utamanya adalah komunikasi politik terkait dengan proses kemenangan Partai keadilan sejahtera dalam Pemilihan Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dengan memperhatikan strategi public relations politik yang dilakukan para kader partai keadilan sejahtera. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjelaskan model public relations politik yang dilakukan kader partai keadilan sejahtera.

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang strategi komunikasi politik dalam pemenangan Pemilu gubernur dan bagaimana strategi public relations politik yang mesti dilakukan agar partai politik dapat memperoleh kemenangan secara efektif atas calon yang diusungnya. Penelitian diharapkan mampu memberikan pedoman dan pandangan bagi para aktivis dan praktisi politik dalam melakukan komunikasi dengan baik dan tepat dalam berbagai momen kegiatan politik, memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen media, image, informasi maupun manajemen informasi.

## **1.2. Kajian Hasil Penelitian PKS**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partai Keadilan Sejahtera telah banyak dilakukan diantaranya adalah Fitriyah dan Tinov (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi PKS dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian menggunakan metode Deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, strategi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting PKS Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yakni dengan pengokohan kader partai, pendekatan terhadap tokoh masyarakat, mengenalkan dan mempopulerkan lambang partai dan calon anggota legislatif, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Penelitian Fitriyah dan Tinov ini mengkaji tentang strategi PKS dalam Pemilu Legislatif dan mengamati faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan penelitian kami penekanannya lebih ke strategi PR Politik PKS dalam Pemilu gubernur Jawa Barat.

Firman Noor (2007) Meneliti tentang moderasi dan pemikiran politik PKS sebagai partai fundamentalis. Tujuan penelitian ingin memperoleh gambaran tentang sikap PKS sebagai partai Fundamentalisme terhadap keragaman dan bagaimana PKS beradaptasi dengan demokrasi. Untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan PKS terhadap ideologi negara Pancasila dan konsep negara-bangsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, PKS tetap setia dengan pandangan Islam fundamentalisnya, akan tetapi menunjukkan pandangan moderat dalam berbagai hal. Fundamentalisme moderat setuju untuk bersikap kooperatif dan kompromi terhadap

pihak lain, sejauh kepentingan dan tujuan politik mereka juga terakomodasi. kaum fundamentalis moderat cenderung setuju dengan demokrasi, karena dengan demokrasilah mereka bisa eksis, dan memberikan ruang untuk sebuah pemerintahan. Penelitian Noor ini lebih terfokus kepada sikap PKS yang selama ini dianggap sebagai partai Islam Fundamentalis dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia. Sedangkan penelitian yang kami lakukan mengkaji tentang strategi PKS dalam Membentuk citra partai dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat dan tidak terlalu fokus kepada kajian ideologi yang menjadi pegangan PKS.

Arifuddin (2011). Penelitian ini membahas tentang bentuk pesan politik dan pengaruh pesan-pesan politik caleg PKS melalui SMS Layanan Pesan Singkat terhadap pemilih dalam pemilu legislatif 2009. Deskriptif kualitatif dan kuantitatif caleg PKS Kota Makassar mempunyai cara yang berbeda dalam mengolah pesan politik melalui SMS yang kemudian dikirim ke pemilih. Ada pesan politik yang bersifat informative juga ada yang persuasive. Penyusunan pesan tertentu diyakini oleh caleg dapat menarik perhatian pemilih. Semua bentuk pesan politik caleg PKS melalui sms yang masuk ke handphone pemilih dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu, mempromosikan dirinya, agar masyarakat dapat terbujuk untuk mengalihkan pilihannya pada caleg tersebut.

Penelitian Arifuddin ini menganalisis bentuk dan pengaruh pesan politik dari caleg PKS untuk mengajak atau membujuk calon pemilih. Sedangkan penelitian kami ingin menjelaskan strategi PR politik PKS dalam membangun citra di lingkungan eksternal dan internal, serta melakukan hubungan dengan media massa. Penelitian Perdana dkk memberikan gambaran secara umum mengenai strategi pemilihan Legislatif PKS. Sedangkan penelitian kami dibatasi pada kajian strategi PR politik PKS dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat.

Perdana dkk (2014) Penelitian ini mengkaji tentang strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera pada Pileg 2014 di Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai strategi pemilihan legislatif Partai Keadilan Sejahtera 2014 di Boyolali. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, strategi pemilihan legislatif PKS menerapkan pendekatan segmentasi, dengan memilih sekelompok orang tertentu yang paling mungkin dipengaruhi oleh program strategi kampanye PKS. Strategi kampanye PKS

dilakukan dengan menggunakan media dan penjualan langsung. Perbedaannya, penelitian Perdana dkk memberikan gambaran secara umum mengenai strategi pemilihan Legislatif PKS. Sedangkan penelitian kami dibatasi pada kajian strategi PR politik PKS dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat.

Nurussa'adah dan Sumartias (2017). Penelitian ini menjelaskan mengenai Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Keterbukaan Ideologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam keterbukaan ideologi di DPW PKS Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi etnografi komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi politik yang berlangsung dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS, serta kader, simpatisan dan masyarakat Jawa Barat. Komunikasi politik yang disampaikan dalam beberapa kegiatan DPW PKS Jawa Barat dilakukan melalui pola komunikasi organisasi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari retorika, propaganda, public relations, kampanye politik, serta lobi politik.

Penelitian ini memiliki kesamaan wilayah penelitian di Jawa Barat. Erfina dan Suwandi mengkaji tentang pola keterbukaan Ideologi PKS dengan penekanan pada pola komunikasi organisasi. Sedangkan kajian kami lebih menekankan pada strategi PR Politik PKS dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat.

**Tabel: 1.1.**  
Matrik Review Hasil Penelitian Sejenis

| NO | ITEM   | JUDUL  | TUJUAN  | METODE DAN TEORI    | HASIL PENELITIAN   | PERBEDAAN   |
|----|--|--|---|---------------------|--|---|
| 1  | <b>Afidatul Fitriyah M. Y.Tiyas Tinov</b><br>(Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013). | Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif 2009                        | untuk mengetahui strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi PKS dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau | Deskriptif analitis | Strategi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting PKS Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yakni dengan pengokohan kader partai, pendekatan terhadap tokoh masyarakat, mengenalkan dan mempopulerkan lambang partai dan calon anggota legislatif, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. | Penelitian Fitriyah dan Tinov ini mengkaji tentang strategi PKS dalam Pemilu Legislatif dan mengamati faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan penelitian kami penekanannya lebih ke strategi PR Politik PKS dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat |
| 2  | <b>Firman Noor</b><br>(Jurnal Studia Islamika, Vol.14, No.3,2007)  | Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan | Tujuan penelitian ingin memperoleh gambaran tentang sikap PKS sebagai partai Fundamentalisme  | Deskriptif analitis | PKS tetap setia dengan pandangan Islam fundamentalisnya, akan tetapi menunjukkan pandangan moderat dalam   | Penelitian Noor ini lebih terfokus kepada sikap PKS yang selama ini dianggap sebagai partai Islam   |



|   |  |   |  |                                       |   |  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|
|   |  | Sejahtera   | terhadap keragaman dan bagaimana PKS beradaptasi dengan demokrasi. Untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan PKS terhadap ideologi negara pancasila dan konsep negara-bangsa. |                                       | berbagaihal. Fundamentalslisme moderat setujuuntuk bersikap kooperatif dan kompromi terhadap pihak lain, sejauhkepentingan dan tujuan politik mereka juga terakomodasi. kaum fundamentalismoderat cenderung setuju dengan demokrasi, karena dengan demokrasilahmereka bisa eksis, dan memberikan ruang untuk sebuah pemerintahan          | Fundamentalis dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia. Sedangkan penelitian yang kami lakukan mengkaji tentang strategi PKS dalam Membentuk citra partai dalam Pemilu pada Gubernur Jawa Barat dan tidak terlalu fokus kepada kajian idiologi yang menjadi pegangan PKS. |
| 3 | <b>Arifuddin</b><br>KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.3 Juli - September 2011 | Pengaruh Pesan Politik Caleg PKS Melalui SMS Terhadap Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Makassar | Menganalisis bentuk pesan politik dan pengaruh pesan-pesan politik caleg PKS melalui SMS Layanan Pesan Singkat (SMS) terhadap pemilih dalam pemilu legislatif 2009.                  | Deskriptif kualitatif dan kuantitatif | caleg PKS Kota Makassar mempunyai cara yang berbeda dalam mengolah pesan politik melalui SMS yang kemudian dikirim ke pemilih. Ada pesan politik yang bersifat informative juga ada yang persuasive. Penyusunan pesan tertentu diyakini oleh caleg dapat menarik perhatian pemilih. Semua bentuk pesan politik caleg PKS melalui sms yang | Peneltiian Arifuddin ini menganalisis bentuk dan pengaruh pesan politik dari caleg PKS untuk mengajak atau membujuk calon pemilih. Sedangkan peneltiian kami ingin menjelaskan strategi PR politik PKS dalam membangun citra di lingkungan eksternal dan internal, serta         |

|   |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   | masuk ke handphone pemilih dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu, mempromosikan dirinya, agar masyarakat dapat terbujuk untuk mengalihkan pilihannya pada caleg tersebut  | melakukan hubungan dengan media massa.  |
| 4 | <b>Perdana Yoga Ade, Kushandajani, Retno H, Nunik.</b><br>(Journal of Politic and Government Studies. Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014) | Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Pileg 2014 di Kabupaten Boyolali. | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai strategi pemilihan legislatif Partai Keadilan Sejahtera 2014 di Boyolali | Deskriptif Kualitatif   | Strategi pemilihan legislatif PKS menerapkan pendekatan segmentasi, dengan memilih sekelompok orang tertentu yang paling mungkin dipengaruhi oleh program strategi kampanye PKS. Strategi kampanye PKS dilakukan dengan menggunakan Media dan Penjualan Langsung | Penelitian Perdana dkk memberikan gambaran secara umum mengenai strategi pemilihan Legislatif PKS. Sedangkan penelitian kami dibatasi pada kajian strategi PR politik PKS dalam Pemilu Gubernur Jawa Barat. |
| 5 | <b>Erfina Nurussa'adah, Suwandi Sumartias</b><br>Vol 5, No 1 (2017)  | Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Keterbukaan Ideologi       | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam keterbukaan ideologi di DPW PKS Jawa Barat          | Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi etnografi | Komunikasi politik yang berlangsung dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS, serta kader, simpatisan dan masyarakat Jawa Barat. Komunikasi politik yang                                 | Penelitian ini memiliki kesamaan wilayah penelitian di Jawa Barat. Erfina dan Suwandi mengkaji tentang pola keterbukaan Ideologi PKS dengan penekanan pada pola komunikasi organisasi. Sedangkan            |

|  |  |  |  |            |  |   |
|--|--|--|--|------------|--|---|
|  |  |  |  | komunikasi | disampaikan dalam beberapa kegiatan DPW PKS Jawa Barat dilakukan melalui pola komunikasi organisasi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari retorika, propaganda, public relations, kampanye politik, serta lobi politik. | kajian kami lebih menekankan pa strategi PR Politik PKS dalam Pemilukada Gubernur Jawa Barat. |
|--|--|--|--|------------|--|---|

### **1.3. Kajian Teoritis dan Konseptual PKS**

#### **1.3.1. Kajian Teoritis**

##### **Teori Konstruksi Sosial**

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu bebas berdasarkan kehendaknya. Manusia melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosial dalam lingkungannya. Teori ini memandang Individu manusia sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Poloma, 2000: 301). Pemilukada merupakan suatu proses sosial yang berupaya membangun hubungan dan relasi antara partai dengan partai lain dan antara fungsionaris partai dengan masyarakat dengan membangun realitas atas kebersamaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Teori ini didalamnya terkandung pemahaman, bahwa kenyataan dibangun secara sosial, Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri, sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger, 1990: 1).

Bagi Berger dan Luckmann (1990:31-32), kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan (*par excellence*) sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*). Dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Sehingga sesuatu yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.

Ontologi paradigma konstruktivis memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Menurut Berger dan Luckmann (1990:61), institusi masyarakat tercipta dan

dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara subjektif, namun pada kenyataannya, semua dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama.

Konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann (Horton dan Hunt 1984: 17-18) menjelaskan tentang realitas subjektif dan objektif tentang masyarakat. Masyarakat dalam pandangan mereka adalah suatu kenyataan objektif, seperti: orang, kelompok, dan lembaga-lembaga adalah nyata, terlepas dari pandangan kita terhadap mereka. Akan tetapi masyarakat juga suatu kenyataan subjektif, dalam arti bagi setiap orang dan lembaga-lembaga lain tergantung pada pandangan subjektif orang tersebut.

Pilihan seseorang terhadap partai politik atau terhadap calon gubernur akan bergantung juga kepada seberapa jauh orang tersebut mengenal calon gubernur. Apa rencana program yang akan dilakukan dan seberapa jauh masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Penilaian masyarakat tersebut tentu akan subjektif sesuai dengan pemahaman dan kedekatan yang telah dibangun antara parati calon kepala daerah tersebut.

### **Teori Interaksi Simbolik**

Interaksi simbolik merupakan teori yang berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik menurut Effendy (1989: 352) adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat, berlangsung proses internalisasi.

Interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu.

Perspektif teori interaksi simbolik menyatakan bahwa, orang-orang sebagai peserta komunikasi (komunikator) bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramal. Dengan kata lain, teori ini berasumsi bahwa manusia memiliki kekuatan dalam berkomunikasi dan lebih aktif. Kualitas *simbolik* secara implisit terkandung dalam istilah *interaksional* jauh berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai dengan pertukaran stimulus respons. Dalam konteks ini, Blumer, menekankan kepada tiga premis yang menjadi dasar utama model ini, yaitu: *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya (simbol verbal, simbol nonverbal, lingkungan fisik). *Kedua*, makna itu berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, makna diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Mulyana, 2004: 160).

### **Teori Performa Komunikasi**

Performa komunikatif merupakan salah satu konsep penting yang dibahas dalam teori budaya organisasi. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis pembahasan kedua yaitu; sosialisasi paradigma baru PKS. Teori ini menyatakan bahwa, anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi. Performa adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Walaupun sistem kategori tidak selamanya eksklusif, performa akan mendapatkan gambaran bagaimana perilaku manusia dapat difahami. Performa komunikatif menurut West dan Turner (2008: 325) dibedakan menjadi performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis, dan performa enkulturasi. Performa-performa ini dapat dilaksanakan oleh anggota manapun dalam organisasi.

**Performa Hasrat.** Performa hasrat merupakan kisah-kisah mengenai organisasi yang seringkali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. Seringkali orang dalam berorganisasi begitu menggebu-gebu dalam bercerita latar belakang dan kejadian yang berkaitan dengan organisasi atau institusinya. Cerita itu bisa terjadi dalam proses interaksi sesama komunitasnya ataupun melalui berbagai media.



Performa ini sering ditampilkan partai politik sebagai bahan untuk menarik simpati massa dengan menceritakan prestasi, kebaikan dan program-program yang akan dilakukan partai di masa mendatang. Paradigma baru dalam sosialisasinya juga memperkenalkan diri dengan menceritakan perubahan-perubahan yang sudah dan akan dilakukan Partai keadilan sejahtera ke depan dengan memberikan harapan-harapan pencerahan kepada masyarakat.

Performa Sosial. Performa sosial merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerja sama di antara anggota organisasi. Pepatah yang mengatakan hal kecil memulai hal yang besar berhubungan langsung dengan performa ini. Senyuman ataupun tegur sapa akan menciptakan suatu rasa kekeluargaan dan ini merupakan bagian dari budaya organisasi.

Sosialisasi paradigma baru berupaya membangun kesefahaman dan kedekatan antar anggota organisasi partai dan juga dengan masyarakat luas. Partai keadilan sejahtera menyadari bahwa, untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu Jawa Barat, maka kerja sama anggota partai dengan organisasi kemasyarakatan harus dilakukan, karena untuk menarik simpati dan dukungan masa tidak bisa hanya dengan menunggu, akan tetapi perlu pro-aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Performa Politis. Performa politis merupakan perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan atau kontrol. Ketika anggota organisasi terlibat dalam performa politis, mereka mengkomunikasikan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Performa ini terkait dengan pembagian kekuasaan yang diperjuangkan oleh masing-masing anggota dalam suatu komunitas organisasi. Orientasi dasar dari suatu partai politik adalah mendapatkan kekuasaan, sehingga performa ini akan melihat bagaimana kader-kader Partai keadilan sejahtera mendemonstrasikan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkannya.

Performa Enkulturasasi. Performa enkulturasasi mencakup perilaku organisasi yang membantu para karyawan dalam menemukan makna dari menjadi anggota suatu organisasi. Performa ini merujuk pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu

berkontribusi. Performa ini mendemonstrasikan kompetensi seorang anggota dalam sebuah organisasi.

Performa komunikasi merupakan teori yang akan menjelaskan tentang berbagai interaksi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Partai keadilan sejahtera adalah sebuah organisasi politik dinamis yang didalamnya terkait erat dengan berbagai interaksi yang akan memunculkan berbagai penampilan dari masing-masing anggota.

Sebagai bagian dari teori budaya organisasi, teori ini menekankan pada cara-cara manusia (anggota) membentuk realitas organisasi dan memahami makna budaya dari kinerja organisasi. Penelitian ini pertama-tama menjelaskan tindakan anggota organisasi Partai keadilan sejahtera dan selanjutnya menyusun penafsiran dari tindakan tersebut dalam bahasa yang tidak hanya difahami dari sudut pandang anggota organisasi Partai, tetapi juga dapat difahami oleh orang-orang diluar organisasi Partai keadilan sejahtera.

Teori ini berfokus pada hasil-hasil interaksi sosial dalam organisasi. Sesuatu dihasilkan ketika manusia berinteraksi, dan teori tersebut menggarisbawahi beragam makna yang dikembangkan dalam komunikasi organisasi sehari-hari (Littlejohn & Foss., 2009: 387). Lima konsep performa komunikasi secara sinergi digunakan untuk mendukung penelitian komunikasi politik yang menelaah tentang performa interaksi anggota Partai keadilan sejahtera dalam berbagai kegiatan organisasi. Performa-performa ini kemudian diamati dan dimaknai kesesuaiannya dengan proses sosialisasi paradigma baru PKS.

### **1.3.2. Kajian Konseptual**

#### ***Public Relations* Politik**

Public Relations adalah salah satu bentuk spesialisasi komunikasi yang bertujuan untuk memajukan saling mengerti dan berkerjasama antara semua pihak yang berkepentingan guna mencapai keuntungan dan kepuasan bersama (Palapah dan Syamsudin). Jadi, *public relations* sama sekali bukanlah kegiatan yang sifatnya dadakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian” maksudnya untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut berkepentingan. Dengan adanya satu

penggalkata“saling” maka organisasi juga harus memahami setiap kelompok atau individu yang terlibat dengannya (istilah yang umum adalah“khalayak” atau public) (Jefkins,1992 : 8).

Froehlich dan Rudiger mendefinisikan *Public Relations* politik sebagai penggunaan saluran-saluran media untuk mengkomunikasikan interpretasi isu-isu politik yang khusus dalam upaya pengumpulan dukungan publik. Sementara itu, Moloney dan Colmer (2001) memahami *Public Relations* politik sebagai alat strategi bagi parpol untuk menggunakan kebijakan (*policy*), kepribadian (*personality*), dan presentasi (*presentation*) guna memperoleh perhatian pemilih. (Heryanto dan Zarkasy, 2012:7).

Aristoteles pernah menyimpulkan bahwa '*man is by nature a political animal*'. Artinya bahwa manusia sejatinya tidak akan pernah bisa lepas dari aktivitas berpolitik. (Heryanto dan Zarkasy , 2012.8). Jika dalam praktek *Public Relations* perusahaan yang menjadi komponennya, antara lain *Shareholder*, *Customer* dan pekerja untuk mengefektifkan peluang-peluang yang ada, meneguhkan yang sedang berjalan dan mengevaluasi kinerja perusahaan, hal yang sama pun dilakukan dalam *Public Relations* politik. Hanya jika dalam perusahaan produknya adalah bisnis guna mencapai keuntungan ekonomi, maka dalam politik produknya adalah aktivitas yang terhubunga dengan politik yang tujuannya adalah mencapai tujuan politik seseorang, sekelompok orang atau sebuah institusi politik.

Heryanto dan Zarkasy mengemukakan bahwa berbagai pemaparan terkait dengan *Public Relations* politik dapat kita identifikasi sejumlah pemahaman tentang *Public Relations* politik antara lain sebagai berikut: *Satu*, *Public Relations* politik terkait dengan melayani publik internal dan publik eksternal dari sebuah institusi atau organisasi politik, seperti partai. *Dua*, *Public Relations* biasanya terkait dengan sejumlah isu dan dinamika khusus yang di kelola guna mendapatkan perhatian para pemilih (*voters*). *Tiga*. *Public Relations* politik memiliki orientasi pada pengumpulan dukungan seluas mungkin terhadap khalayak melalui berbagai saluran yang bisa dimanfaatkan mulai saluran formal hingga saluran informal. (Heryanto dan Zarkasy, 2012:8)

Inti dari *Public Relation* adalah kegiatan komunikasi yang terjadi dalam sebuah lembaga atau organisasi. Kegiatan komunikasi tersebut antara komunikator

dengan komunikannya memiliki saling pengertian dan didalam proses komunikasi tersebut tidak terjadi kesalahan persepsi. Kegiatan *Public Relation* adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan *Public Relations* itu sendiri.

Posisi *Public Relations* merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal, karena secara operasional *Public Relations* bertugas membina hubungan harmonis antar organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Hubungan dengan publik tersebut sangat penting dipelihara dan dibina dalam rangka mempertahankan *goodwill* dan kepercayaan pada publik serta dalam rangka menimbulkan pengertian bersama dan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dengan konsumennya

Fungsi petugas *Public Relations* berkembang sesuai dengan kemajuan dunia usaha. ada 4 fungsi utama yang dituntut dari petugas PR yaitu sebagai *communicator, relationship, backup management, good image maker*. *Public Relations* juga berfungsi untuk merumuskan fungsi PR yaitu; *pertama*, untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. *Kedua*, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. *ketiga*, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. *keempat*, melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. (Effendy, 2006. 36).

Dasar-Dasar *Public Relations*, berupa uraian-uraian tentang fungsi diatas pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang *Public Relations* secara universal sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan oleh seorang *Public Relations Officer* (PRO) yaitu hanya menyangkut dua fungsi. *Satu*, Menyampaikan kebijaksanaan manajemen kepada publik. *Dua*, Menyampaikan opini publik kepada manajemen. (Yulianuta, 2012.54).

*Internal relations* dapat didefinisikan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan cara menjalin kerjasama dengan seluruh lingkungan kerja, baik itu pemegang saham, manajer, atasan dan seluruh karyawan yang ada. Hubungan public

internal tersebut sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan sebagai dua sisimata yang mempunyai arti samad an saling terkait satu sama lain (Jefkins dalam Ruslan, 2003:252),

Tujuan dibinanya hubungan dengan publik internal adalah: “Untuk menciptakan hubungan baik yang harmonis, dalam rangka memperoleh kesediaan kerjasama (*cooperation*) diantara orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi/instansi/perusahaan serta memungkinkan orang-orang tersebut untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi lebih tinggi dengan mendapatkan kepuasan dari hasilnya” (Yulianita, 2007:59).

*Internal Relations* menempatkan karyawan atau anggota perusahaan sebagai komponen yang penting dalam kerja humas. Meningkatkan semangat kerja karyawan merupakan salah satu tujuan dari *Internal Public Relations*. Hubungan pimpinan dan bawahan akan berjalan dengan baik bila kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suasana yang harmonis seorang pimpinan harus berkomunikasi dengan bawahan baik secara vertikal maupun horizontal.

Tujuan *public relations* berdasarkan kegiatan *internal relations* dalam sebuah organisasi dapat mencakup kepada beberapa hal, yaitu: 1) Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap, tingkah laku dan opini publik terhadap perusahaan. Terutama sekali ditujukan kepada kebijaksanaan perusahaan yang sedang dijalankan 2) Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang sedang dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan opini publik 3) Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu kebijaksanaan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut kepada berbagai aktifitas rutin perusahaan, juga menjelaskan mengenai perkembangan perusahaan tersebut. Dimana pada tahap selanjutnya diharapkan publik karyawan akan tetap *well inform* dan 5) Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan kegiatan yang bersifat *internal public relations* dalam perusahaan tersebut (Djaja, 1985: 17)

Tujuan utama aktivitas *Public Relations* politik adalah mendapatkan dukungan politik dari publik internal dan publik eksternal dalam mencapai tujuan

khusus organisasi atau institusi politik. Tujuan ini jika dirinci lagi adalah sebagai berikut.

*Satu*, menciptakan soliditas dan kohesivitas internal organisasi melalui upaya pelayanan publik internal, sehingga seluruh komponen dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan dalam pencapaian tujuan organisasi. *Dua*, menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus organisasi. *Tiga*, memperoleh penemuan-penemuan, penyimpulan-penyimpulan, dan rekomendasi atas sejumlah isu dan dinamika politik yang berkembang. *Empat*, mengetahui secara pasti posisi kekuatan, kelemahan dan peluang serta tantangan organisasi di tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal ataupun eksternal organisasi melalui evaluasi yang sistematis, terarah dan berkelanjutan. (Heryanto dan Zarkasy, 2012:9)

### **Public Relations dan Partai Politik**

Partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang relatif sama. Mereka sepakat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, mempunyai sifat, tujuan dan cara yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti gerakan politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Melihat peranannya sebagai organisasi kemasyarakatan, partai politik mempunyai beberapa fungsi, fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai alat penengah pertikaian. Partai politik di negara-negara komunis mempunyai fungsi-fungsi berbeda dengan fungsi-fungsi tersebut. Partai-partai politik di negara-negara totaliter berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesatuan dan keseragaman, sebagai satu-satunya mobilisator massa menuju tujuan ideologi partai (Budiardjo, 2005: 5.36)

Selain itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.



Beranjak dari pengertian-pengertian partai politik tersebut ada tiga prinsip dasar dari partai politik, *Pertama adalah Partai sebagai koalisi*, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi didalamnya terdapat faksi-faksi. Partai keadilan sejahtera misalnya, didalamnya ada Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999).

*Kedua, partai sebagai organisasi*, untuk menjadi partai yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan, maka partai politik harus dikelola, dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok.

*Ketiga, partai sebagai pembuat kebijakan*, partai politik mendukung secara kongkrit terhadap kader-kadernya yang duduk di jajaran eksekutif (pemerintahan), partai politik juga memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader menduduki posisinya (Cangara, 2009: 209-210)

Memperhatikan terhadap pengertian, prinsip, dan fungsi-fungsi partai, maka sejatinya ketiga hal tersebut syarat dengan muatan-muatan aspek komunikasi, sehingga sejalan dengan fungsi komunikasi politik itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik, memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan pendukung partai politik, serta mendidik masyarakat dengan pemberian informasi dan sosialisasi tentang cara-cara melakukan pemilihan umum sebagai sarana penyampaian hak suara.

Public relations politik sebagai suatu bagian dari kajian komunikasi politik, tentu memiliki keterkaitan didalamnya, karena eksistensi partai politik juga akan banyak ditentukan seberapa besar masyarakat mengetahui reputasi suatu partai politik dan bagaimana peran dan kiprahnya dalam memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat dan Negara, serta apa saja program-program yang mau ditawarkan untuk membangun kehidupan masyarakat. Selain itu partai politik juga diharapkan untuk bisa menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan. Public relations politik juga berfungsi untuk menjadi mediator dan komunikator dalam membangun hubungan di internal dan eksternal partai sehingga terjalin hubungan harmonis diantara berbagai pihak.

### ***Public Relations Politik dan Opini Publik***

Para ilmuwan sefaham bahwa opini publik merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi situasi politik suatu negara, sekaligus bisa menjadi ancaman terhadap wibawa dan keberadaan pemerintah. Pembahasan opini publik selalu berkaitan dengan komunikasi politik, opini publik merupakan kekuatan luar biasa yang dapat mendukung dan meyerang penguasa, namun sebaliknya opini publik dapat mendukung terhadap keberadaan pemerintah.

Opini publik terdiri dari dua komponen kata, yaitu publik dan opini, secara sederhana publik adalah suatu kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam masalah tertentu. Pendapat adalah suatu ekspresi sikap terhadap topik tertentu. Sikap yang kuat akan muncul ke permukaan dalam bentuk opini. Sewaktu opini semakin kuat akan lebih terungkap atau terbentuk perangai tertentu (Seitel dalam Soemirat dan Ardianto, 2005: 104). Publik bukanlah bersifat umum, karena publik merupakan komunitas besar yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam suatu persoalan tertentu. Terbentuknya opini dikarenakan adanya isu-isu tertentu yang menjadi perbincangan publik, diantara publik sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang suatu hal sehingga terjadi diskusi dan perdebatan yang menghasilkan opini-opini bervariasi.

Opini publik dalam konteks politik dikatakan relevan dan menjadi salah satu faktor politik, jika dalam banyak hal berpengaruh terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan sesuatu keputusan oleh para penyelenggara negara dan para politisi lainnya (Kousaulas dalam Muhtadi, 2008: 37). Opini publik bagi pemerintahan demokratis menjadi penting karena pemerintahannya menganut sistem *bottom up*, yaitu sistem yang kebijakannya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dari bawah, sehingga opini publik akan menjadi agenda perhatian tersendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Lain halnya dengan negara-negara otoriter yang bersifat *top down*, dalam pemerintahan seperti ini opini publik tidak begitu penting, karena hampir semua kebijakannya berdasarkan inisiatif penguasa.

Negara-negara yang menyatakan diri memakai sistem demokrasi, beranggapan bahwa partai politik memiliki peran dominan dalam suatu sistem pemerintahan. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus

melahirkan program politik, program politik itu perlu dikomunikasikan kepada publik, ketika program politik dikomunikasikan kepada publik, akan tercipta opini publik mengenai suatu permasalahan sosial, namun tidak semua publik dapat menilai suatu perkembangan dalam masyarakat, sehingga partai politiklah yang akan mengarahkan perhatian dan pertimbangan publik terhadap kejadian tertentu.

Pembentukan opini publik tidak hanya berguna bagi partai politik akan tetapi juga sangat membantu bagi masyarakat awam untuk memahami suatu kejadian dan peristiwa tertentu. (Firmanzah, 2011: 75)

### **Strategi *Public Relations* Politik**

Public relations atau Humas pada dasarnya adalah bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan citra yang menguntungkan bagi perusahaan, organisasi maupun lembaga. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kegiatan Humas semestinya diarahkan pada upaya menggararap persepsi stekholder sasaran terkait yaitu public internal dan eksternal sampai terciptanya citra yang menguntungkan.

Public relations (PR) yang semula banyak dimanfaatkan oleh organisasi, perusahaan ataupun lembaga, kini PR sudah banyak dimanfaatkan dalam kegiatan politik sebagai upaya untuk membangun citra yang menguntungkan dengan jalan membuat berbagai macam program baik yang dilakukan oleh partai politik maupun perseorangan yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Citra positif atau citra baik adalah paling diinginkan oleh setiap orang, apalagi seorang calon pemimpin. Seorang pemimpin yang ingin dipercaya oleh masyarakat harus berupaya membangun citra. Citra diri seseorang akan ditentukan oleh persepsi orang lain, berdasarkan pengetahuannya tentang seseorang atau suatu organisasi. Prestasi dan reputasi akan menjadi bahan penilaian seseorang atau organisasi.

Citra tidak bias diukur secara sistematis, karena citra itu abstrak, namun wujud dari citra sendiri dapat dirasakan berdasarkan penilaian baik dan buruk dari public. Citra juga akan sangat berkaitan dengan ranah politik, hal ini dibuktikan dengan ramainya politik pencitraan yang dilakukan oleh para pelaku politik demi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat (Ruslan, 1994:66)

Wacana politik akan berkaitan dengan suatu system politik yang menjadi acuan dalam menentukan keputusan-keputusan politik untuk mencapai tujuan suatu Negara atau pemerintahan. Penentuan berbagai kebijakan politik akan banyak dipengaruhi

oleh kualitas dan karakteristik seorang pemimpin, maka masyarakat akan memilih calon pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu negara atau pemerintahan.

Kemampuan seorang calon pemimpin akan diketahui oleh masyarakat manakala ada informasi yang memberi kejelasan tentang sosok pemimpin tersebut, terutama dari peran dan investasi yang telah ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk citra positif di masyarakat. PR sebagai alat pembentuk citra akan banyak berperan dalam mendongkrak citra seseorang.

Kepala daerah dianggap sebagai figure di lingkungannya, maka seorang calon Kepala Daerah semestinya faham apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerahnya, sehingga pencitraan yang dilakukan juga harus sesuai dengan harapan-harapan masyarakat di daerahnya. Membangun citra positif dalam ranah politik tentunya diperlukan strategi agar tidak keliru dalam proses menginterpretasikan citra diri kepada masyarakat.

Pencitraan politik merupakan pencitraan panjang yang mengaktifkan setiap nilai-nilai partai sebagai pemberi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membangun citra politik diperlukan cukup waktu tidak hanya setiap lima tahun sekali. Ketika seorang calon diliput di media massa, maka itulah yang disebut pencitraan, namun pencitraan politik bukan sekedar membangun wacana di media massa, pencitraan politik memerlukan proses yang dibangun dengan strategi (Wasesa, 2011:4)

Partai keadilan sejahtera yang selama ini dianggap sebagai partai fundamentalis, bagaimana bisa menjelaskan diri bahwa, PKS juga memiliki sikap terbuka dan bersedia untuk bekerja sama dengan partai lain. Bagaimana masyarakat dapat mempercayai dan meyakini Partai keadilan sejahtera sebagai partai yang bisa memberikan janji untuk memberikan harapan kepada masyarakat.

### **Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu pemilihan terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah

menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah merupakan kepala eksekutif di daerah.

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: *pertama*, Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

*Kedua*, Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Ketiga*, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

*Keempat*, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

*Kelima*, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat (Muchlisin Riadi, 2016)

Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk menjadi Kepala Daerah, seorang bakal calon Kepala Daerah harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi seorang calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Syarat utama adalah seorang warga Negara Indonesia dan persyaratan lain sebagai berikut (Pasal 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014):

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Telah mengikuti uji publik.
5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota.
6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.
17. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
18. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD.
19. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
20. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
21. Tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.

Tahapan Pemilihan Kepada Daerah. Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahap kegiatan haruslah berurutan.

*Pertama*, Tahap Persiapan Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi lima pelaksanaan, yaitu:

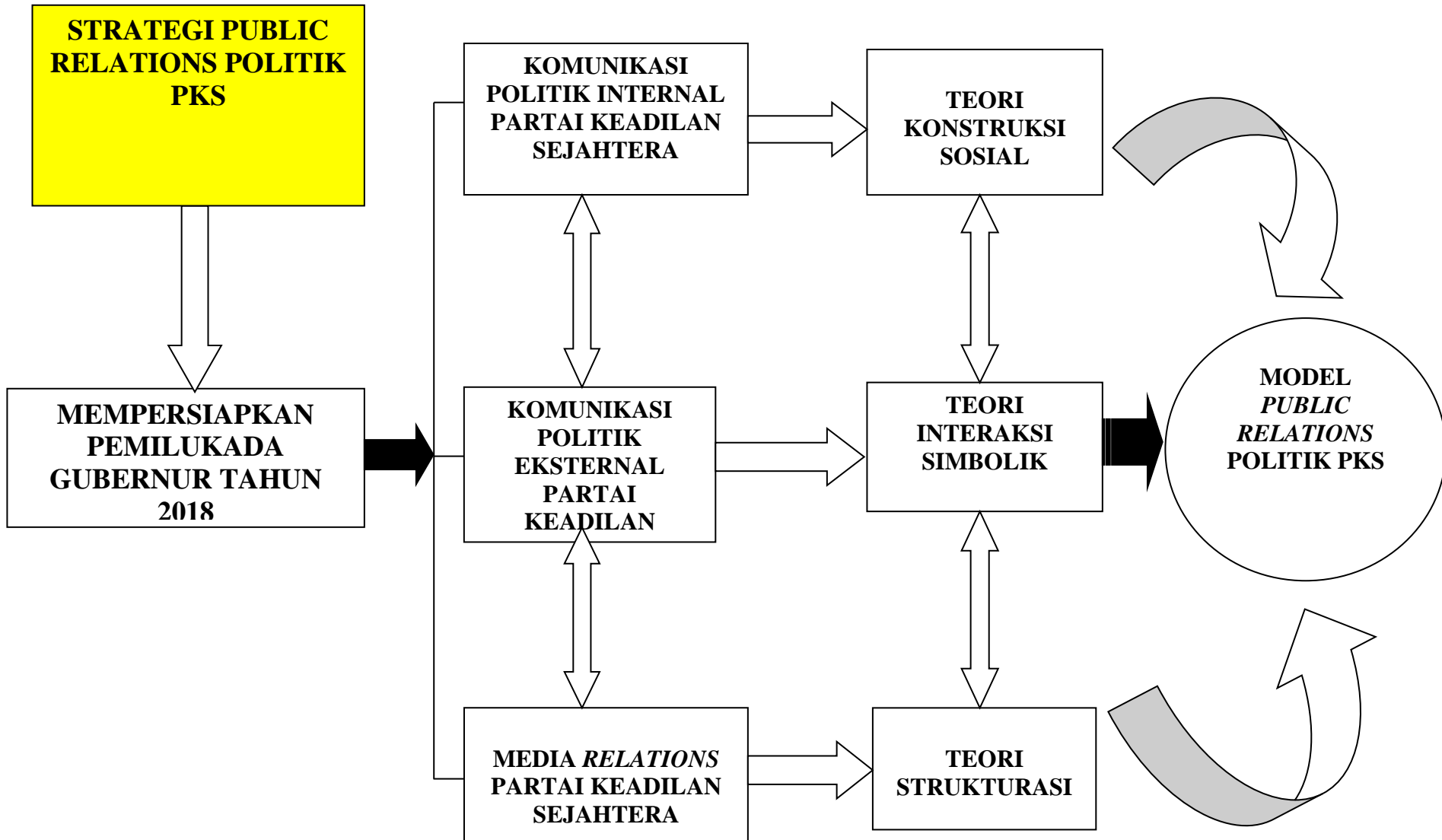
1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.

5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

*Kedua*, Tahap Pelaksanaan. Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu:

1. Penetapan daftar pemilih.
2. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
3. Kampanye.
4. Pemungutan suara.
5. Perhitungan suara.
6. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih.
7. pengesahan, dan pelantikan.

#### 1.4. Kerangka Pemikiran



### **1.5. Metodologi Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para kader PKS seperti; pengurus, penasehat dan fungsionaris Partai keadilan sejahtera Tingkat Wilayah Jawa Barat, khususnya mereka yang terlibat secara langsung dengan proses pemenangan Pemilu Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian adalah komunikasi politik terkait dengan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera dalam proses pemenangan Pemilu calon Gubernur Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif mempelajari fenomena yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berupaya memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang diberikan oleh peneliti tersebut (Denzin dan Lincoln 2000: 2). Deacon melihat metode penelitian kualitatif dihubungkan dengan paradigma interpretif. Metode ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi maupun ritual sosial (Daymon & Holloway: 2008: 5).

Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Bogdan dan Taylor, mereka menyatakan, bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dsvariabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010: 4)

Penelitian kualitatif ini mendorong peneliti cenderung untuk menelaah makna, konteks, dan pendekatan holistik terhadap fenomena. Peristiwa-peristiwa komunikasi politik yang terjadi merupakan fenomena yang akan ditafsirkan berdasarkan makna-makna yang diberikan atau disampaikan oleh para pengurus

dan fungsionaris partai keadilan sejahtera. Penggalian datanya menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Fenomena dalam penelitian kualitatif selalu menjelaskan tiga aspek penting. *Pertama*, pada unit analisis mikro dimana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa, sehingga dapat dijelaskan secara rinci. Pembatasan ini memungkinkan penelitian mendapatkan hasil mendalam. *Kedua*, penelitian kualitatif bersifat holistik dalam arti, melihat objek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Suatu fenomena dilihat sebagai suatu keseluruhan dari sebuah proses sosial budaya. *Ketiga*, penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan, sebagai salah satu kekuatan, karena perbandingan ini juga yang membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul (Abdullah, 2007: 14).

Komunikasi politik pks yang peneliti bahas akan dibatasi pada persoalan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera, kemudian dianalisis secara rinci tentang penerapannya. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus sebagai salah satu tradisi penelitian kualitatif dengan pendekatan proses (Combs, 1981: 39-66). Studi kasus merupakan pengujian intensif yang menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. Kasusnya mungkin sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye. Tujuan studi kasus adalah meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya. Pada hakikatnya studi kasus mencoba menghidupkannuansa komunikasi dengan menguraikan kenyataan yang dilakukann dengan cara: 1)melakukan analisis mendetail mengenai kasus dan situasi tertentu. 2) berusaha memahaminya dari sudut pandang orang-orang yang bekerja disana. 3) mencatat berbagai macam pengaruh dan aspek-aspek hubungan komunikasi dan pengalaman. 4). Membangkitkan perhatian pada cara faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain (Daymon & Holloway, 2008: 162).

Penelitian ini bertumpu kepada penerapan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera dalam proses pemenangan Pemilu calon Gubernur Jawa Barat, penelitian ini bermaksud pula menganalisis bentuk-bentuk dan model komunikasi politik dalam Pemenangan Pemilu tersebut.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan keperluan atau kebutuhan penelitian. Informan penelitian ini rencananya akan diambil dari beberapa unsur yang dianggap memiliki kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu dari Pengurus DPW Partai keadilan sejahtera Propinsi Jawa Barat, untuk pertimbangan data diambil juga informan dari partai lain, serta dari pengamat Politik dan Ormas.

Data penelitian digali dari para nara sumber yang bertindak sebagai pelaku melalui serangkaian wawancara dan diskusi, sehingga diharapkan mendapatkan informasi yang akurat. Adapun Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dibagi atas tiga bagian yaitu: Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan sebagai strategi mencari data dengan mengamati perilaku maupun kejadian yang terdapat pada subjek dan objek penelitian. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan dengan cara mengamati kejadian atau proses yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa komunikasi politik dalam proses Pemilu Gubernur Jawa Barat yang melibatkan elite PKS seperti; fungsionaris dan kader Partai keadilan sejahtera.

Pada kegiatan pengamatan ini dilakukan pencatatan lapangan yaitu mencatat peristiwa-peristiwa yang terkait dengan komunikasi politik pengurus dan fungsionaris PKS, agar memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti juga memakai alat perekam dan alat kamera. Adapun aspek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pemahaman dan motif yang membentuk perilaku komunikasi dalam aktivitas public relations politik Partai keadilan sejahtera.

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi, terutama antara peneliti dan orang yang diteliti. Kualitas sebuah wawancara sangat ditentukan dari apakah interaksi antara peneliti dan yang diteliti dapat terjadi dengan baik sehingga orang yang diteliti bersedia menceritakan hal-hal yang terjadi sebenarnya, bukan hal yang seharusnya.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan yang terkait dengan pembahasan penelitian. Wawancara ini dilakukan utamanya adalah untuk memperoleh data primer dari informan dengan menggali pemikiran dan pemahaman subjek penelitian terkait dengan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mendalam, agar informan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya.

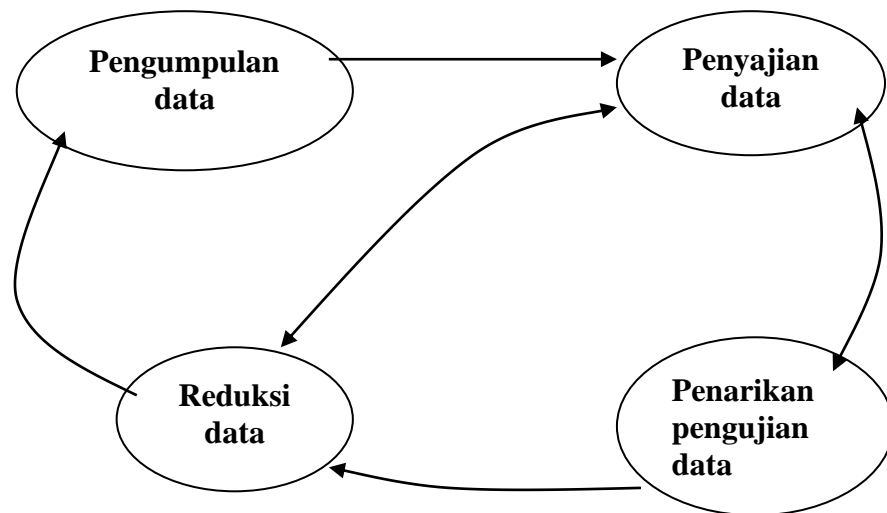
Peneliti akan berusaha melakukan wawancara dengan pendekatan kekeluargaan dengan suasana yang cair, sehingga informan bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, ini untuk menghindari formalitas yang akan mempersempit ruang gerak jawaban informan.

Penelitian ini dilakukan pula studi dokumentasi, dengan menganalisa literature-literatur yang terkait dengan permasalahan sebagai data sekunder, seperti: buku-buku, literatur yang relevan dengan penelitian, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan sebagainya. Penelitian ini juga dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen, arsip, transkrip, buku, surat kabar, website dan teks-teks lainnya yang berhubungan dengan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera dalam pemenangan Pemilu calon Gubernur Jawa Barat. Peneliti berupaya memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi atau pesan yang terkandung dalam dokumentasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian digambarkan melalui kalimat secara benar dan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan strategi public relations politik Partai keadilan sejahtera dalam pemenangan Pemilu calon Gubernur, data yang diperoleh ditelaah dengan menjawab permasalahan yang telah diagendakan. Karena penelitian ini berbentuk

kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992: 16-21) pada intinya terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu rangkaian yang berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya.



**Gambar 1.6.**  
Analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman  
(Sumber: Diadaptasi dari Pawito, 2007: 105)

Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data hasil penelitian. Uji keabsahan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik prosedur Triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu: *pertama*, membandingkan data wawancara dengan data hasil pengamatan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan pembahasan, untuk meyakinkan kebenaran data tersebut, peneliti mencocokkannya dengan pengamatan di lapangan, apakah yang disampaikan nara



sumber tersebut relevan atau tidak, peneliti juga membandingkannya untuk kemudian mengolahnya dengan mempertimbangkan akurasi.

*Kedua*, membandingkan atau mengkonfirmasi antara satu subjek dengan subjek lainnya. Para kader dan fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera sebagai subjek yang diteliti dan sebagian dijadikan sebagai informan setelah diteliti dan diamati kemudian keterangan-keterangannya dibandingkan antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh data yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.

*Ketiga*, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Setelah data wawancara dibandingkan dengan data hasil pengamatan dan mengkonfirmasi antara satu subjek dengan subjek yang lain kemudian ditetapkan sebagai data hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan data hasil penelitian tersebut dengan dokumen-dokumen yang berupa buku-buku, transkrip, maupun audio visual yang terkait dengan peristiwa-peristiwa komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera baik di tingkat DPW Jawa Barat maupun daerah kabupaten/kota. Dari metode triangulasi tersebut peneliti berharap mendapatkan data-data yang bernilai dan sesuai dengan target penelitian yang diharapkan.

Penelitian ini berskala wilayah Jawa Barat, lokasi penelitian utamanya adalah fungsionaris PKS di tingkat Propinsi Jawa Barat. Pengamatan dilakukan juga dalam peristiwa-peristiwa pelaksanaan public relations politik Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu pada di daerah kabupaten dan kota, di wilayah Jawa Barat Tahun 2018.

## **BAB II**

### **SELAYANG PANDANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

#### **2.1. Sejarah Singkat Partai keadilan sejahtera**

Berdirinya PKS berasal dari gerakan dakwah kampus, yaitu kegiatan dakwah meliputi serangkaian kegiatan yang menyeru pada agama yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di kampus. Munculnya dakwah kampus tersebut sebagai reaksi terhadap ketidakramahan dan tindakan represif rezim Soeharto terhadap kelompok “Islam politik” yang terlihat sejak menit pertama setelah Soeharto berada di tampuk kekuasaan. Beberapa mantan tokoh dan elite Masyumi yang dipelopori Muhammad Natsir lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada 1967.

DDII ini kemudian mendorong tokoh-tokohnya untuk mengubah haluan strategi, lebih memilih jalur revitalisasi dakwah dengan membidani proses kelahiran gerakan sosial Islam yang lebih cair di kampus-kampus. Peran DDII yang paling krusial dalam memperluas dakwah kampus juga tampak pada proses kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah (LMD).

Lembaga ini didirikan oleh tokoh yang berafiliasi dengan DDII, Imaduddin Abdulrahim, yang sejak 1970-an aktif melakukan pelatihan-pelatihan keagamaan di Masjid Salman ITB. Banyak aktivis mahasiswa Muslim yang tertarik dengan pelatihan-pelatihan LMD dan mulai menyebarkan ideologi dan kurikulum LMD di kampus-kampus mereka.

Pada awal 1980-an, dakwah kampus mulai memperkenalkan istilah usrah (bahasa Arab yang berarti “keluarga”) dan mulai melakukan pengaturan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya dengan sistem dan program yang lebih sistematis. Usrah adalah kelompok-kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat serta dirajut melalui struktur hierarkis. Kebanyakan anggota usrah tidak mengenal anggota-anggota di kelompok usrah yang lain. Dari struktur organisasi semacam ini, dakwah kampus berkembang pesat dan masjid-masjid kampus sejak saat itu menjadi pusat aktivitas mereka. Penggunaan usrah (sistem

sel) dalam program pelatihan keagamaan di kegiatan dakwah kampus mengadopsi sistem pengkaderan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Pada awal 1980-an, pemikiran dan model aktivisme Ikhwan telah tersebar luas melalui interaksi dengan para alumni dari Timur Tengah.<sup>23</sup> Pada waktu yang sama, melalui kerja para intelektual dan orang-orang yang berafiliasi dengan DDII—yang paling terkenal adalah Abu Ridho dan Prof. Rahman Zainuddin—tulisan-tulisan mengenai tokoh-tokoh utama Ikhwan seperti Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian memungkinkan para aktivis dakwah kampus mengakses karya-karya ini dalam bahasa Indonesia.

Dakwah kampus makin berkibar seiring dengan momentum dan semangat kebangkitan Islam yang muncul di kalangan masyarakat terdidik, terutama mahasiswa-mahasiswa di universitas sekuler pada 1970-an. Masjid-masjid kampus menjadi pusat aktivitas dakwah, dan dihadiri banyak mahasiswa yang ingin ikut serta di dalam lingkaran kecil untuk belajar agama (halaqah). Pengaruh revivalisme Islam ini terlihat begitu kentara dalam penggunaan jilbab dan baju koko di kalangan mahasiswa, makin ramainya masjid kampus oleh aktivitas keagamaan, serta makin maraknya dunia penerbitan Islam di kampus dan lain-lain. Pada awalnya, pemikiran teologi dan model aktivisme

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) diambil dari gagasan-gagasan Ikhwan Hasan al-Banna dan Jamiat Islami al-Mawdudi. Intisari pemikiran Ikhwan dan Jamiat Islami bertumpu pada argumen bahwa Islam adalah al-dîn: jalan hidup yang total, komprehensif, dan merangkum semua aspek kehidupan tanpa menarik batas pemisah antara aqidah wa syariah (akidah dan syariat), dîn wa dawlah (agama dan negara), dan dîn wa dunya (ukhrawi dan duniawi).

Dalam perkembangan berikutnya, meskipun banyak perbedaan, pelbagai faksi dan kubu di LDK akhirnya tetap sepakat mendukung pendirian Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986. Pada pertemuan tahunan FSLDK ke-10 di Malang pada 1998, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia, beberapa aktivis LDK mengumumkan

pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI memang didirikan oleh para aktivis FSLDK yang memiliki

hubungan dengan kelompok Tarbiyah atau Ikhwan seperti Fahri Hamzah. Di tengah makin maraknya kegaduhan sosial politik di fase-fase akhir menjelang kejatuhan Soeharto, KAMMI turut aktif menggelar protes untuk mendesak agenda reformasi.

Segera setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, tokoh-tokoh KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik Islam. Sebuah survei internal di antara kader-kader inti gerakan ini menunjukkan bahwa mayoritas aktivis mereka setuju untuk mendirikan partai. Partai tersebut kemudian diberi nama “Partai Keadilan” (PK).

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma’il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma’il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Pada Pemilu 1999, PK menarik perhatian banyak pengamat karena tampil sebagai “satu-satunya partai politik dengan struktur kepengurusan yang transparan, terorganisir rapi dan memiliki agenda program yang jelas.” Tak seperti partai-partai Islam lain yang sangat bergantung pada ketokohan figur, PK menegaskan pentingnya egalitarianisme dalam Islam dan kekuatan kolektif, dan tidak banyak memberi ruang bagi tampilnya pemimpin kharismatik. Minimnya tokoh yang memiliki magnet elektoral menjadi ciri khas PK, tapi kader dan

simpatisannya dituntut patuh terhadap norma agama dan loyal terhadap garis partai.

PK menggalang basis dukungannya dari kalangan aktivis Tarbiyah yang kebanyakan berasal dari daerah perkotaan, terdidik, muda, dan memiliki pandangan keagamaan yang ortodoks. Namun sayangnya PK justru mengabaikan pasar pemilih yang mayoritas tidak memahami prinsip-prinsip Islam secara memadai.

Bisa ditebak, pada 1999, dalam pemilu demokratis pertama di Indonesia sejak 30 tahun, PK gagal mencapai batas minimal perolehan suara yang memungkinkan partai itu berkompetisi pada pemilu berikutnya (electoral threshold). Kegagalan ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan, terkait dengan ketidakmampuan PK dalam menarik simpati pemilih baru. PK terlalu menutup diri bagi publik luas sehingga gagal memperebutkan ceruk pemilih yang lebih besar. Setelah kegagalan itu, PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada April 2002. Pada pemilu legislatif 2004, PKS berhasil meraih 7,34 persen suara atau 45 dari 550 kursi yang diperebutkan, sebuah capaian elektoral luar biasa dibanding pendahulunya Partai Keadilan (PK), yang hanya memperoleh 1,3 persen pada Pemilu 1999.

Pada Pemilu 2009, PKS meningkatkan dosis pencitraan sebagai partai terbuka. PKS dengan berani menampilkan sosok-sosok anak-anak punk atau wanita yang tidak mengenakan jilbab pada iklan-iklan partai di televisi. Beberapa elite partai juga mengemukakan wacana calon legislatif non-Muslim. PKS bahkan mengusung Soeharto sebagai guru bangsa dalam iklan. Di satu sisi, kampanye masif PKS untuk memperbesar ceruk pemilih ini berhasil meningkatkan dukungan elektoral di wilayah-wilayah yang sebelumnya bukan basis PKS seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain kampanye tersebut justru menjadi bumerang karena tak seluruh basis harakah yang menopang PKS sepakat dengan isu-isu inklusif seperti itu. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PKS naik secara tidak signifikan, tapi jauh lebih baik ketimbang partai-partai lainnya yang mengalami “gempa tektonik elektoral” besar-besaran akibat kenaikan tajam perolehan suara Partai Demokrat.

## **2.2. Struktur Organisasi dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera**

### **Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera**

- (1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat, yaitu :
  - a. Majelis Syura,
  - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
  - c. Majelis Pertimbangan Pusat,
  - d. Dewan Pengurus Pusat, dan
  - e. Dewan Syariat Pusat.
- (2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, yaitu :
  - a. Majelis Pertimbangan Wilayah,
  - b. Dewan Pengurus Wilayah, dan
  - c. Dewan Syariat Wilayah.
- (3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ialah Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang.
- (5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa ialah Dewan Pengurus Ranting.
- (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota.

### **Susunan Pengurus DPP PKS Periode 2015-2020**

Ketua Majelis Syuro : Dr Salim Segaf Al Jufri

Wakil Ketua Majelis Syuro : Dr Hidayat Nur Wahid

Sekretaris Majelis Syuro : Ir H Untung Wahono, MSi

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suharna Surapranata, MT

Ketua Dewan Syariah : Dr KH Surahman Hidayat

Presiden : M Sohibul Iman, PhD

Sekretaris Jenderal : Dipl Ing Taufik Ridlo, Lc

Wakil Sekretaris Jenderal : Dr Mardani Ali Sera

Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman, SSos

Wakil Bendahara Umum : Dr Abdul Kharis Al Masyhari  
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional : Anis Matta, Lc  
Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : H Abdul Muiz Saadih, MA  
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Dr Taufik Ramlan  
Wijaya  
Ketua Badan Perencanaan : KH Bukhori Yusuf, Lc, MA  
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : H Ahmad Heryawan, Lc,  
MSi  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara : Dr Hermanto  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan :  
Drs H Gufron Azis Fuadi  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar: Tate Qomarudin, Lc  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya : Ir H Sigit Sosiantomo  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali : Sugeng Susilo  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan : Hb Aboe Bakar Al-Habsi, SE  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi : Cahyadi Takariawan  
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Intim : Dr H Muhammad Kasuba, MA  
Ketua Bidang Kaderisasi : Amang Syafruddin, Lc  
Ketua Bidang Kepemudaan : Mustafa Kamal, SS  
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga : Asep Saefullah Danu  
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dra Wirianingsih, Msi  
Ketua Bidang Seni dan Budaya : Muhammad Ridwan  
Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi : Drs H Musholli  
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader:  
Deni Tresnahadi  
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Hilman Rosyad, Lc  
Ketua Bidang Polhukam : Drs H Almuzammil Yusuf, MSi  
Ketua Bidang Kesra : Dr Fahmy Alaydroes, MM, MED  
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan  
Hidup :  
Ir H Memed Sosiawan, ME

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan : Ledia Hanifah Amalia

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Drs Khoirul Anwar, Apt

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Dedi Supriyadi, SIKom

### **2.3. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera**

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-citanasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.4. Platform Partai Keadilan Sejahtera**

Pemantapan Ekonomi Makro. Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pemantapan Otonomi Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

Perjuangan Petani. Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas. Memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.



Perjuangan Buruh. Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin dikalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih

Perjuangan Nelayan. Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.

Usaha Kecil Dan Menengah. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai penguatan sektor UKM yang terbukti telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Memacu kinerja kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan yang sanggup bertahan di masa krisis, agar ekonomi Indonesia bangkit dengan basis yang lebih mandiri.

Politik Nasional. Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Tetapi membangun sistem politik yang sehat dan kuat lebih menentukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representative.

Pertahanan Keamanan. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar pertahanan dan keamanan negara. Menempatkan polisi selaku aparat penegak hukum dan tentara sebagai alat pertahanan negara. Menghadapi gejolak masyarakat dengan metoda dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.

Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM. Memadukan proses penegakan hukum yang bertanggung-jawab agar tak terpisahkan dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masalah sebagai manifestasi keadilan transisional.

Politik Luar Negeri. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan menjaga perdamaian dunia berdasarkan

prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

Pendidikan Nasional. Menjadikan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia yang utuh. Merancang sistem pendidikan nasional yang komprehensif dengan cakupan alternative pembiayaan yang murah tapi berkualitas. Merealisasikan alokasi 20% anggaran negara bagi kemajuan pendidikan, terutama demi peningkatan kesejahteraan pendidik.”

Kepeloporan Pemuda. Membina pemuda hari ini sebagai calon pemimpin masa depan. Menyelamatkan generasi muda Indonesia yang terjerat dalam bayang-bayang budaya global dan dekadensi moral, dengan strategi pembelajaran kolektif kaum muda dalam memahami sejarah bangsa dan mensiasati masa depan yang penuh tantangan.

Perempuan Indonesia. Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki di atas landasan ketakwaan, dengan orientasi kerja menebar kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mewujudkan perempuan Indonesia yang bertakwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.

Pembinaan Keluarga. Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.

Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial. Menetapkan visi kesehatan paripurna selaku panduan strategis untuk dijalankan secara berkelanjutan. Mengalokasikan anggaran negara yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas sebagai bagian amat penting dari wujud kesejahteraan sosial.

Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional. Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.”

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Industri. Mensinergikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan keluar untuk merintis kembali pembangunan industri strategis yang kolaps. Selanjutnya meningkatkan penguasaan iptek menjadi tiket utama menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

Seni, Budaya, Dan Pariwisata. Membentuk bangsa yang memiliki disiplin kuat, etos kerja, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu karakter warga bangsa yang tangguh.

Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama. Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

Komunikasi Dan Informasi. Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik tertentu.

**BAB III**  
***PUBLIC RELATIONS* POLITIK INTERNAL PARTAI KEADILAN**  
**SEJAHTERA**

**3.1. Membangun Kebersamaan dan Soliditas Internal Partai**

**Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang dianggap selalu konsisten dengan keislamannya dan menyatakan diri sebagai partai dakwah, mereka selalu berusaha untuk membangun soliditas di lingkungan internalnya. PKS menginginkan terciptanya kekuatan dan soliditas partai yang harus dimulai dari lingkungan internal terlebih dahulu. Karena mereka beranggapan bahwa, untuk bisa banyak berkontribusi bagi bangsa dan Negara harus dimulai dari dalam partai dahulu, baru kemudian bisa berkiprah lebih luas.

Sebelum menelaah lebih jauh, konsolidasi yang dijalani PKS agak unik, karena mengandung empat aspek. Pertama, konsolidasi ideologi yang tertuang dalam Falsafah Dasar Perjuangan (2007), sebenarnya merupakan elaborasi dari Manifesto Politik PK yang dirumuskan tahun 1998, yakni kristalisasi pemikiran yang mendasari berdirinya partai berdasarkan nilai-nilai spiritual dan pengalaman sejarah panjang. Piagam Deklarasi PK (1998) dan PKS (2003) serta seluruh materi kaderisasi PKS dapat dicerna dengan jernih, apabila memakai kerangka falsafah dasar perjuangan ini.

Kedua, konsolidasi politik termaktub dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS yang memuat langkah-langkah strategis PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa. Platform PKS tahun 2003 berjudul “Agenda Penyelamatan Bangsa”, tahun 2007 dipertegas menjadi “Memperjuangkan Masyarakat Madani”, dan tahun 2017 direvisi menjadi “Indonesia Madani”. Di sinilah seluruh upaya politik PKS didedahkan dan dikomunikasikan kepada publik Indonesia dan dunia, tak ada yang disembunyikan (*hidden agenda*). Seluruh anggota DPR RI dan DPRD dari Fraksi PKS di seluruh Tanah Air harus memahami dan menjalankan platform kebijakan, karena mereka sebagai etalase dan juru bicara PKS di arena publik.

Ketiga, konsolidasi organisasi termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, yang mengatur tertib organisasi sejak di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting. Ada yang unik dalam tradisi (konvensi) PKS, yakni arahan pimpinan (khithob qiyadi) berfungsi penting karena menjadi pengarah dalam praktek kehidupan berorganisasi. Lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam PKS adalah Majelis Syura (yang anggotanya dipilih secara berkala dan demokratis lewat pemilihan raya), dan posisi Ketua Majelis Syura sebagai mandataris MS sangat sentral. Siapapun kader PKS yang pernah berhadapan dengan Ketua MS PKS berarti dia berhadapan dengan pemegang mandat tertinggi, seperti kader PDIP berhadapan dengan Megawati atau kader PD berhadapan dengan SBY.

Tapi, perlu diberi catatan: sosok Salim Segaf al-Jufri selaku Ketua MS PKS penerus perjuangan KH Hilmi Aminuddin memiliki karakter khas, dapat ditemui siapa saja, terutama saat shalat berjamaah di masjid atau di markas dakwah PKS. Selain itu, Habib Salim biasa berkunjung incognito ke berbagai daerah untuk mengetahui kondisi nyata kader dan simpatisan PKS, menjenguk mereka yang sakit atau terkena musibah dan membutuhkan pertolongan. Habib Salim juga mengetahui persis, siapa yang tak menyukai kepemimpinannya dan menolak kebijakan yang ditetapkan PKS, tanpa perlu mengerahkan aparat intelijen. Bahkan, Habib Salim biasa mendengar langsung keluhan masyarakat tentang PKS (seperti isu pengikut Wahabi, pragmatisme politik yang mengabaikan nilai agama, dan lain-lain tanpa mereka tahu, bahwa dia penentu kebijakan di PKS. Tipe kepemimpinan unik dalam tradisi politik Indonesia. Dari sini konsolidasi digerakkan.

Aspek keempat adalah konsolidasi basis massa yang belum tuntas dirumuskan PKS, karena sepanjang dua dekade pasca reformasi belum terbentuk basis sosial baru dalam perpolitikan Indonesia. PKS masih dicirikan sebagai partai urban dengan konstituen mayoritas kaum terdidik, padahal hasil pemilu 2014 menunjukkan perluasan suara PKS hingga ke daerah pedalaman (Papua/Papua Barat), dan turun/stagnannya dukungan PKS di daerah perkotaan. Target pemilu bagi PKS selaku 'Partai Dakwah' bukan semata perolehan suara meningkat,

melainkan apakah basis sosial baru tumbuh untuk melakukan transformasi bangsa? Menyadari posisinya sebagai partai menengah, PKS terbuka untuk berkolaborasi dengan kekuatan sosial-politik manapun yang sejalan dengan visi-misi Indonesia Madani.

Dengan wawasan konsolidasi yang komprehensif itu, terlalu sempit jika ada yang menyimpulkan gugatan yang dihadapi Presiden PKS saat ini telah mengganggu soliditas partai. Laporan mantan kader PKS tentang fitnah dan pencemaran nama baik itu seharusnya ditolak Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan mengaku anggota Fraksi PKS di DPR RI. Padahal sejak 1 April 2016, yang bersangkutan sudah dipecat dari keanggotaan PKS berdasarkan keputusan Majelis Tahkim PKS tertanggal 11 Maret 2016. Secara substansial/faktual, yang bersangkutan bukan lagi anggota PKS, meskipun proses hukum formal masih berjalan.

Mengapa yang bersangkutan tidak berani menggugat Ketua MS PKS yang menjadi referensi bagi Presiden PKS untuk menjelaskan status sebenarnya kepada public. Apakah kita masih bisa percaya akan reputasi personal dari seseorang yang tidak peduli dengan reputasi partai yang pernah membesarkannya atau reputasi lembaga publik yang dipimpinnya. Betapa banyak gugatan yang dapat ditujukan kepada yang bersangkutan, bila semua ucapan dan tindakannya selama ini diproses hokum.

Salah satu contoh pernyataan oknum mantan kader itu yang bersifat mengadu-domba, itu jelas suatu hasutan, karena Ketua Fraksi PKS di DPR RI (Jazuli Juwaini) tidak pernah bermanuver untuk mengganti Presiden PKS, dan telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI setidaknya lima kali untuk mengganti posisi Wakil Ketua DPR RI dengan Ledia Hanifa, lalu yang bersangkutan dinyatakan bukan anggota Fraksi PKS lagi .

Polisi harus melihat track record pelapor itu, jika mau diusut banyak ucapan dan tindakannya akan berdampak hukum. Masyarakat umum perlu menyadari kerumitan hukum di Indonesia, apalagi terkait sengketa partai politik. Belum pernah ada sejarahnya, gugatan anggota parpol yang dimenangkan peradilan, karena memang UU Partai Politik (Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU

Nomor 2 Tahun 2011) menyerahkan perselisihan partai politik kepada kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Dalam konteks PKS, kewenangan itu ada pada Majelis Tahkim. Selama status partainya absah dan mahkamah partainya juga absah, maka putusan apapun yang diambil internal partai itu dipandang absah. Persoalan muncul, jika status partai atau mahkamah partainya diragukan. Hal itu ditegaskan kembali dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ketentuan tentang perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

Kekalahan di tingkat pertama dan banding merupakan ujian tersendiri bagi PKS, yang konsisten mengikuti prosedur hukum positif. Hal itu menjadi pelajaran bagi partai-partai lain yang mungkin menghadapi kasus serupa di masa datang. Peradilan perdata terhadap PKS memperlihatkan keganjilan dari awal, sejak putusan sela yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak mendengarkan pandangan tergugat dan Hingga putusan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan yang salah menyebut subyek hukum partai lain. Semua keganjilan itu sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial, karena ada tindakan hakim yang tak profesional (*unprofessional conduct*). Semoga majelis hakim MA memeriksa proses pengambilan putusan yang keliru di tingkat PN dan PT, serta merujuk pada surat edaran Ketua MA tentang perselisihan parpol.

Andai putusan kasasi menentukan PKS kalah, maka kader dan konstituen PKS perlu bersabar diri. Pengalaman ini menyadarkan pentingnya reformasi hukum dan lembaga peradilan agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Selama ini perhatian PKS belum terlalu intensif untuk pembenahan hukum nasional, termasuk penyiapan SDM Hakim dan Jaksa yang profesional. Oknum mantan kader itu bisa saja memenangkan proses peradilan, namun untuk menjadi kader PKS harus melalui proses sesuai AD/ART PKS. Konstitusi partai harus jadi rujukan, karena AD/ART PKS telah dinyatakan sah dan tidak bertentangan

dengan UUD NRI 1945 atau produk perundangan lain. Di situ terlihat kompatibilitas regulasi internal PKS dengan sistem hukum nasional.

Di tengah dinamika organisasi dan gejolak politik nasional/global saat ini, penting sekali untuk melakukan konsolidasi pemikiran dan hati. Kader PKS sudah terlatih menghadapi berbagai tantangan. Fitnah terhadap Presiden PKS bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Karena partai yang serius melaksanakan misi perbaikan organisasi dan kondisi bangsa, pasti akan menghadapi tantangan berat dari berbagai penjurur (Waluyo, 2018)

Para pengurus PKS dalam setiap kesempatan pertemuan dengan para kadernya sering menyampaikan perlunya persatuan dan kebersamaan untuk memajukan partai dan bangsa kedepan. Presiden PKS Muhamad Sohibil Iman Pada Musyawarah Nasional ke-4 partai dakwah. dia memberikan pesan kepada para kader PKS. Iman berkeinginan agar para kader bisa menyelesaikan masalah bangsa, dengan kekuatan di internal partai. Bila para kader PKS bercita-cita ingin melihat negeri Indonesia maju, maka harus bisa membereskan masalah partai itu sendiri. Sejak awal PKS berdisi sebagai partai dakwah, maka identitas itu harus dibenahi dulu. Partai dakwah tidak bisa ditopang tanpa kader yang berkualitas. Karena itu seluruh kader PKS harus bersih, peduli dan professional dengan menjalankan visi-misi sebagai partai yang kokoh dan berkontribusi untuk masyarakat.

Karena itu dengan kualitas kader yang mumpuni, PKS menargetkan kadernya meraih suara 19% pada Pemilu 2019. Dengan kader seperti itu, wajar kalau nanti di tahun 2019, PKS ingin menjadi partai papan tengah. PKS berharap akan meraih suara di atas 10 persen. (Putra, 2018)

PKS berupaya agar para kadernya selalu membangun negeri secara bersama-sama dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ataupun golongan. Bangsa Indonesia adalah plural, *segmented*, dan *fragmented*, sehingga perlu membangun kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat. Melahirkan kepedulian dan kebersamaan. Dalam konteks nasional, PKS ingin jadi pelopor perwujudan cita-cita nasional.



Kader PKS diharapkan bisa menjadi kontributor peradaban dunia. Kita hidup dalam dunia yang terkoneksi. Maka PKS ingin Indonesia semakin aktif dalam kerja sama dengan lembaga lain, ataupun parpol di negara lain. PKS ingin jadi kontributor peradaban dunia yang semakin adil, damai dan sentosa.

Untuk membangun kebersamaan PKS juga mengadakan peringatan Hari Besar Islam dengan mengumpulkan beberapa pengurus, kader dan konstituen PKS. Peringatan Maulid Nabi menjadi sebuah momen tersendiri untuk membangun soliditas dan kebersamaan partai, karena tradisi maulid yang selama ini dilakukan masyarakat Indonesia cukup ampuh menjaga akidah dan semangat kaum muslimin untuk menjaga keberlangsungan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Acara ini dihadiri jajaran pimpinan PKS, termasuk Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyertakan kehadiran para ulama dan habib serta masyarakat sekitar. Dalam acara tersebut dibacakan Ratib Al-Hadad, yaitu zikir yang mengingatkan akan keutamaan dan keagungan akhlak Rasulullah Saw. Dan taushiyah dari para ulama dan habaib yang hadir.

Konsolidasi internal partai terus dilakukan terutama menjelang Pilgub Jawa Barat Tahun 2018. Konsolidasi dilakukan sekitar di wilayah Jawa Barat, acara konsolidasi lebih sering dilakukan oleh calon Gubernur dari PKS yaitu Ahmad Syaikhu beserta Tim.

Menjelang Pilgub Jawa Barat, dalam rangka memperkuat konsolidasi dan memperkuat dukungan internal, Ahmad Saikhu mengadakan safari ke daerah-daerah diantaranya adalah ke DPD PKS Kabupaten Cianjur.

Ahmad Syaikhu menemui para pengurus DPD PKS Kabupaten Cianjur di Gedung Dakwah Kemenag Cianjur. Cawagub yang akan berdampingan dengan Cagub Deddy Mizwar ini melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan semua pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat Cianjur.

Pelaksanaan konsolidasi, sosialisasi dan silaturahmi tersebut dipusatkan di Gedung Dakwah, Kemenag Cianjur. .Ahmad Syaikhu langsung bertatap muka

dengan beberapa awak media menyampaikan beberapa hal penting untuk siap dan optimis bisa menang maju di Pilgub 2018-2023 melalui mesin partai dan seluruh pendukungnya. Sudah ada sekitar 17 kabupaten/kota atau daerah, mereka kompak memberikan support dan siap mendukung. Syaikhu juga akan terus melakukan silaturahmi dan sosialisasi pada sejumlah tokoh di Jawa Barat.

Syaikhu juga menggelar konsolidasi di Citeureup Bogor yang dihadiri DPC dan DPAC. Konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan visi Memenangkan Kader PKS yang maju dalam Pemilihan Cawagub Jabar pada pemilihan 2018 mendatang. Syaikhu merasa optimis kader yang diusung PKS akan memimpin Jawa Barat, pasalnya selama 3 periode ini PKS menjadi partai yang dipercaya masyarakat Jawa Barat, terbukti dengan kader yang diusungnya saat ini sudah memimpin Jawa Barat bahkan sampai 2 periode. Syaikhu juga menjelaskan bahwa PKS tetap bersama Gerindra membangun Konsolidasi dan koalisi yang tetap terjaga sampai hari ini.

Konsolidasi juga dilakukan Syaikhu dengan menghadiri acara subuh keliling silaturahmi ulama DKM Masjid se-Cimpaean, Tapos, silaturahmi ke Taman Kota Lembah Gurame yaitu pelayanan Kesehatan gratis kerja sama DPR PKS Depok Jaya dengan Senam Tera Indonesia. Momentum keberadaan calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung PKS, dimanfaatkan oleh DPD PKS kota Depok memanaskan mesin Partai dengan mengundang seluruh jajaran pengurus tingkat kota hingga tingkat ranting serta kader PKS se-Kota Depok untuk mendukung pasangan Dedy Mizwar dan Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di tahun 2018 mendatang. Menurut Syaikhu, dirinya dipilih PKS untuk menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi Dedy Mizwar, telah dikomunikasikan dengan DPP Partai Gerindra. Konsolidasi dengan hastag #DepokBergerakJabarMenang mulai ramai oleh kader dan simpatisan PKS yang hadir. Ruangan acara yang luas tidak mampu menampung jumlah peserta yang hadir lebih dari 2500 orang, hingga diluar gedung. Acara Konsolidasi Pemenangan Pilgub Jabar di akhiri dengan Pembacaan Ikrar oleh semua pengurus DPD dan DPC PKS se-Depok.

Di Sukabumi, Syaikhul kembali memanas mesin politiknya, dalam kesempatan itu Syaikhul menegaskan, harapan di Pilgub Jabar agar PKS bisa memenangkan kembali seperti pada dua pilkada sebelumnya di Jabar yang dimenangkan kader partainya.

Modal terkuat untuk memenangkan pilkada, adalah dengan menggerakkan mesin partai. Kedatangannya ke Sukabumi untuk mengingatkan pada semua jajaran agar menjaga soliditas dan menjamin tidak adanya friksi di dalam partai. Kader di setiap daerah siap untuk bergerak. Hal ini merupakan kunci dari kemenangan pilgub Jabar 2018.

Mengenai roadshow, sambung Syaikhul, akan dilakukan mulai September hingga awal Nopember 2017 mendatang. Inti roadshownya ingin bertemu seluruh jajaran struktur maupun kader serta simpatisan di Jabar. Targetnya tidak ada lagi keraguan untuk memberikan dukungan untuk pemenangan pasangan Deddy Mizwar dan Akhmad Syaikhul.

Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi Yusuf Maulana menerangkan, kader PKS yang menjadi gubernur yakni Ahmad Heryawan dinilai telah berhasil membangun Jabar. Dia berharap estafet kepemimpinan dapat dilanjutkan oleh kader PKS lainnya.

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera menggelar konsolidasi pemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Ciamis. Para kader PKS membacakan ikrar pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Astana Gede Kawali. Ketua DPD PKS Ciamis, Dede Herli menuturkan, konsolidasi dilaksanakan untuk pemenangan Pilgub Jabar, PKS telah menentukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhul, sementara untuk calon di Pilkada Ciamis, PKS Ciamis masih melaksanakan mekanisme proses penjangkaran. Dede meminta kepada para ikhwan kader PKS semua berjuang dan memenangkan yang disampaikan dalam untuk memenangkan Pilgub dan Pilkada Ciamis. Untuk Pilkada Ciamis sesegera mungkin akan diumumkan nama yang akan diusung oleh PKS. semua yang mendaftar ke PKS memiliki kesempatan yang sama. diharapkan dalam perhelatan Pilkada Ciamis ini ada kader internal PKS yang nantinya bisa menjadi pendamping. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat

dari PKS, Ahmad Syaikhun menuturkan, dirinya sangat mengapresiasi DPD PKS Ciamis yang menggelar konsolidasi ini yang dihadiri para kader dan berbagai kalangan masyarakat. Hal itu menjadi satu sinyal PKS untuk memenangkan Pilkada Ciamis maupun Jawa Barat.

Garut juga termasuk salah satu daerah yang dikunjungi dalam rangka konsolidasi kemenangan Pilgub Jabar 2018. Anggota DPR RI Fraksi PKS Toriq Hidayat optimis calon yang diusung PKS dalam pesta politik Pilgub Jabar 2018 akan mendapatkan kemenangan, dari perjuangan kader PKS di Jawa Barat telah membuktikan semangat perjuangan dalam memenangkan pilgub Ahmad Heryawan selama 2 periode terakhir. PKS di Jawa Barat sudah sangat jelas di depan mata. Tinggal mengawal suara di Pilgub 2018 mendatang.

PKS optimis akan meraih suara terbanyak jika semua pihak kembali aktif untuk bersama-sama berjuang. Sementara itu, Syaikhun dalam pidatonya mengingatkan agar semangat perjuangan dakwah ini harus ditingkatkan. PKS, menurutnya sudah membuktikan selama 2 periode kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sudah meraih lebih dari 50 penghargaan dari nasional dan internasional.

Setelah PKS dan Gerindra membatalkan dukungannya terhadap Deddy Mizwar, tanpa mengurangi semangat PKS terus menggalang konsolidasi merebut dukungan, terutama dari internal PKS. Seperti yang dilakukan Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhun yang menghadiri Rapat Kerja Pemenangan Wilayah DPW PKS Jabar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Mereka membakar semangat ribuan kader partai dakwah agar solid dalam memenangkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhun. Saat menyampaikan orasi politiknya, Sudrajat menegaskan, kesuksesan kader PKS Ahmad Heryawan memenangi Pilgub Jabar 2008 dan Pilgub Jabar 2013 lalu menjadi bukti kekuatan kader PKS.

Dengan kekuatan tersebut, dia yakin, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhun yang memilih nama Asyik itu mampu memenangi Pilgub Jabar 2018. Tapi jangan lengah, jangan sombong, garagara menang dua kali. Yang ketiga ini harus tertib, karena kontestan cagub/cawagub Jabar lainnya kini tengah bersiap menjalankan

strateginya demi memenangi ajang pesta demokrasi terbesar di Jabar itu. Namun, dengan kekuatan dan kekompakan mesin parpol pengusung dan pendukungnya, pasangan Asyik akan tetap menjadi yang terdepan.

Sudrajat juga mengingatkan seluruh mesin parpol pengusung dan pendukungnya, agar selalu melakukan cek dan ricek terhadap segala hal yang mungkin terjadi di ajang Pilgub Jabar 2018. Tak lupa, Sudrajat pun meminta seluruh mesin parpolnya untuk selalu kompak dan melangkah bersama meraih kemenangan di Pilgub Jabar 2018.

### **3.2. Saluran Komunikasi Internal Partai Keadilan Sejahtera**

Komunikasi dan organisasi terdiri dari dua konsep, namun bisa dibilang keduanya sudah saling terkait satu sama lain dan tidak bisa untuk dipisahkan. Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi ataupun partai politik, sebagai sarana untuk saling berbagi informasi antara para anggota atau pihak yang berada dalam organisasi atau partai politik.

Informasi digunakan untuk menyamakan pandangan para anggota, menentukan tujuan, hingga memutuskan suatu pilihan yang harus diambil oleh organisasi tersebut. Selain dengan cara berkomunikasi pada umumnya, dalam organisasi, terdapat cara khusus untuk berkomunikasi seperti menggunakan memo atau catatan kecil, surat-menyurat, peraturan dan kebijakan yang ditentukan, hingga jumpa pers dengan publik.

Partai Keadilan Sejahtera memberlakukan sistem kaderisasi dengan berbagai jenjang, Jenjang tersebut berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan memilah orang-orang yang disiapkan untuk ditempatkan pada posisi-posisi tertentu, seperti halnya untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur, presiden dan lain sebagainya.

Kader PKS adalah kader terbina, yaitu yang secara intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan partai sangat erat. Seorang kader sekurang-kurangnya adalah minimal harus mengikuti pembinaan “pekanan”, yaitu pembinaan rutin setiap satu minggu sekali dengan sistem group atau kelompok, momen inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai ajang komunikasi internal yang dilaksanakan melalui grup-grup binaan. Kebijakan, arahan, maupun informasi atau lainnya

disampaikan melalui group binaan. Kader dibina dan saling membina antar jenjang pembinaan, dan kontinuitas sistem ini terus dijaga guna mempertahankan soliditas antar anggota partai.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai dakwah, dan mengklaim dirinya sebagai partai bercorak Islam, sehingga kampanye dan sosialisasinya mengarah ke gerakan dakwah. PKS selalu fokus pada pengkaderan atau pembinaan kader dan dalam kegiatan pembinaan kader itulah identitas partai, kebersamaan dan kesatuan, integritas, serta loyalitas anggota partai PKS terbentuk.

Tradisi yang diberlakukan di PKS, Jika tiga kali tidak hadir dalam pembinaan “pekanan” dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka akan ada sanksi atau hukuman sesuai dengan pedoman untuk anggota partai yang sudah ada dan disetujui oleh semua anggota. Karena keterikatan seorang kader dengan partai ini minimal menghadiri pembinaan pekanan.

Dalam kegiatan pekanan itulah PKS mencoba untuk menempa, membentuk karakter, sehingga tercipta kader-kader yang berkarakter baik di tengah masyarakat dan ketika menjabat ia akan menjadi pejabat yang baik, akidahnya benar, akhlakunya juga baik, ibadahnya benar, kemudian bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, dan sesuai dengan 10 karakter yang sudah ditetapkan dalam pembinaan tersebut.

Terdapat enam jenjang keanggotaan dalam keanggotaan PKS, yakni; anggota pemula, muda, madya, dewasa, ahli, dan anggota purna. Dengan kurikulum pembinaan dalam setiap jenjangnya. Penjenjangan ini merupakan upaya untuk membentuk kader, sesuai dengan kecenderungan dan talenta dalam berbagai bidang seperti kecenderungan ke dunia politik, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, ia akan di distribusikan ke dalam bidang tersebut berdasarkan bakat dan kemampuannya.

Adapun “Pekan” merupakan aktivitas internal partai sebagai agenda pembinaan rutin setiap sepekan sekali yang wajib diikuti oleh semua anggota partai pada setiap jenjang keanggotaan. Feedback dari anggota partai terhadap aktivitas pekanan ini dinilai baik, karena mereka wajib mengikutinya secara rutin

sehingga kontinuitas tersebut menjadikan pemahaman para anggotanya sinkron satu sama lain.

**BAB IV**  
**KOMUNIKASI POLITIK EKSTERNAL**  
**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**4.1. Membangun Citra Positif Partai**

Citra politik di masyarakat akan positif jika partai politik dan politikus memegang nilai-nilai kebangsaan. Tidak hanya partai politik, tapi juga dalam tindakan sehari-hari di masyarakat. Partai politik itu menghimpun segala kekuatan dan dasarnya harus kebangsaan. Partai politik akan dicitrakan negatif oleh masyarakat karena tidak memikirkan masalah-masalah bangsa dan justru mencari keuntungan atau kekayaan bagi para anggotanya. Anti-politik muncul karena kedaulatan rakyat dirampas dan bangsa tidak dipedulikan. Sikap yang muncul justru saling menguntungkan diri sendiri dan golongannya selama hampir 15 tahun (Pobottinggi, 2013)

Kinerja parpol berikut perilaku elite politik selama ini masih menyisakan keengganan publik terhadap parpol. Merujuk hasil pengumpulan opini yang diselenggarakan Kompas pekan lalu, sebagian besar publik menilai, jumlah ideal parpol di Indonesia seyogianya di bawah 10 parpol, pada 2014 ada 12 parpol ikut pemilu nasional.

Kondisi ini membuat publik tak terlalu antusias dengan kemunculan parpol baru. Setidaknya, tiga dari empat responden menilai, kehadiran parpol baru saat ini tak diperlukan. Parpol baru bukan jawaban atas kebutuhan akan sarana agregasi politik publik. Pendapat publik itu antara lain dibangun oleh pemahaman umum terhadap parpol pada saat ini. Citra sifat feodalistik atau sentralistik masih melekat pada parpol. Semua keputusan organisasi dilakukan pimpinan pusat, termasuk pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah.

Sebanyak 76 persen responden jajak pendapat ini berpendapat, parpol hanya memperjuangkan kepentingan kelompok. Parpol dipandang sebagai tempat bercokolnya para pemburu popularitas, pencari kehormatan secara sosial, dan pengejar harta secara ekonomi. Tak bisa dipersalahkan jika publik memiliki pemahaman seperti itu. Pasalnya, kisah politisi yang berhasil masuk ke legislatif



cenderung bertarung untuk kuasa dan uang dan yang tak beruntung akhirnya terjerat hukum kini kerap menjadi konsumsi publik.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, 29 anggota DPR periode 1999-2004 terjerat kasus korupsi. Pada DPR periode berikutnya, setidaknya 10 wakil rakyat di Senayan dipenjara karena kasus itu pula. Periode 2009-2014, jumlah politisi yang terlibat kasus korupsi meningkat menjadi sekitar 74 orang. Kondisi di atas turut mbingkai keengganan sebagian publik untuk merespons positif segala sesuatu terkait parpol.

Imaji parpol di Indonesia saat ini masih identik dengan tokoh senior partai. PDI Perjuangan identik dengan Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Hanura dengan Wiranto, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Nasdem yang relatif baru sudah identik dengan Surya Paloh. Dalam kondisi ini, meski cenderung bersikap apatis, publik menaruh harapan terhadap parpol baru yang banyak menyasar kader muda dan dinamis.

Parpol baru diharapkan dapat menawarkan alternatif sosok pemimpin nasional baru. Publik juga berharap, parpol baru tampil sebagai parpol yang modern dan bersih dengan ideologi baru dan pro rakyat. Kerinduan akan hadirnya parpol yang modern menunjukkan bahwa ada keinginan untuk keluar dari bentuk parpol lama. Secara tidak langsung ini menampakkan, parpol yang ada belum berhasil menanamkan nilai dan cita-cita kepada konstituennya. Ideologi partai sekadar seremonial yang dicantumkan dalam visi dan misi.

Dari masa ke masa, keinginan membentuk partai politik baru sejatinya relatif tinggi. Pada 2009, ada 95 parpol baru yang mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, hanya 27 parpol baru yang lolos verifikasi. Setelah proses seleksi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hanya 18 parpol baru yang lolos menjadi peserta pemilu. Kondisi serupa terjadi menjelang Pemilu 2014. Kemenkumham menyatakan, 13 dari 14 parpol baru yang mendaftar tidak lolos verifikasi. Hanya Partai Nasdem yang dinyatakan lolos verifikasi.

Menuju Pemilu 2019, parpol baru pun kembali mencoba keberuntungan di perpolitikan Indonesia. Kemenkumham telah memverifikasi parpol baru hingga 29

Juli 2016. Terdapat lima parpol baru yang mendaftarkan diri, yakni Partai Islam Damai dan Aman, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Rakyat Berdaulat, serta Partai Kerja Rakyat Indonesia.

Namun, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang lolos verifikasi. Sementara Partai Perindo dinyatakan tidak perlu melakukan verifikasi karena sebelumnya telah mendapatkan verifikasi dan badan hukum. Parpol baru hadir karena berbagai alasan dan tawaran. PSI, misalnya, menawarkan ide baru, cara baru, orang baru, dan mesin baru dengan menyasar kaum muda. PSI menyatakan sebagai parpol baru yang tidak tersandera kepentingan politik lama, klientelisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah, dan citra partai politik sebelumnya.

Berbagai alasan pendirian parpol, ada masalah penting yang menghantui parpol. Mayoritas parpol masih belum mampu melakukan manajemen keuangan yang baik dan laporan keuangan yang transparan. Parpol belum bisa memberikan pertanggungjawaban kejelasan uang yang diterima, baik dari sumbangan anggota, sumbangan negara, maupun sumbangan lain yang sah menurut hukum. Akibatnya, sumbangan dari anggota dan sumbangan lain yang sah menurut hukum kadang menimbulkan masalah hukum bagi parpol.

Mayoritas publik menyoroti berbagai fungsi parpol, mulai dari penyalur aspirasi, tempat melakukan pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, hingga kontrol terhadap pemerintah, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum, setidaknya 6 dari 10 responden tidak puas terhadap kinerja parpol selama ini.

Sikap parpol yang lebih mementingkan kelompok turut memperburuk citra parpol di mata publikpun dalam mempersiapkan kadernya untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah, mayoritas publik menilai parpol belum berhasil dalam hal tersebut. Namun, kinerja yang dipandang masih buruk tidak serta-merta membuat citra positif parpol turun drastis. Bahkan, citra parpol cenderung naik dalam beberapa tahun terakhir.

Di balik berbagai kasus korupsi anggotanya, beberapa parpol dipandang masih konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Sudah saatnya parpol tak

lagi abai dan menempatkan rakyat sebagai prioritas dalam implementasi kiprahnya. Rakyat tak sekadar diusung sebagai jargon menjelang pemilu lantas ditinggalkan ketika perhelatan demokrasi usai. Kini, yang dibutuhkan adalah bukti nyata keberpihakan parpol dalam menyejahterakan rakyat Indonesia (Handining, 2016).

PKS sebagai partai yang lahir pasca reformasi ini perlu menjaga citranya dengan melakukan perubahan-perubahan orientasi yang lebih terbuka dan kerakyatan tidak lagi menjadi partai eksklusif, tidak lagi memiliki icon sebagai partai kelas menengah. Bukti nyata hasil kerja akan menjadi poin tersendiri untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat, namun apabila PKS tetap saja tidak merubah mainset politik tersebut, maka PKS tidak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat secara luas sampai ke tingkat akar rumput.

#### **4.2. Pencitraan dan Tantangan Partai**

Pemilu 1999, PKS yang waktu itu masih bernama PK mendapatkan suara 1,36 persen (%). Suara PKS meningkat tajam pada Pemilu 2004 dengan 7,45%. Pada pemilu 2009, perolehan suara PKS tetap naik menjadi 7,88%. PKS pada pemilu 2014 lalu turun sedikit di kisaran angka 6,79 % atau justru naik 273.249 suara dibanding Pemilu 2009. Capaian ini tidak tergolong buruk jika memperhatikan badai yang menerjangnya akibat kasus mantan presidennya Luthfi Hasan Ishaq (LHI).

Fenomena PKS di atas mengantarkannya sebagai partai modern yang diperhitungkan. Beberapa faktor dapat dikaji terkait kondisi PKS dari awal hingga kini. Pertama terkait vitalitas sistemnya. Capaian PKS di Pemilu 2014 lalu jauh dari prediksi sejumlah lembaga survei. PKS diprediksikan jeblok dan tidak lolos parliementery threshold pasca kasus yang menimpa LHI.

Signifikansi suara yang menjungkirbalikkan prediksi disebabkan oleh faktor kuatnya vitalitas PKS. PKS berhasil mempertahankan suara di tengah badai lantaran faktor kaderisasi yang baik, soliditas kader, dan kinerja di lapangan.

Kedua terkait virtualitas politiknya. Hasil survei Awesometric di berbagai media menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik yang paling disebutkan (the most mentioned). PKS dilaporkan lebih dari 213 ribu

kali pada arus utama dan media sosial selama periode sebelum Pemilu 2014. Posisi kedua adalah Partai Demokrat dengan 203.247 kali, disusul oleh Partai Golkar, Gerindra, dan PDIP.

Ketiga terkait kecerdasan dan konsistensi perjuangannya. Kampanye PKS selama pemilu dipandang publik cukup atraktif dan kreatif, baik di media maupun lapangan. Isu yang diangkat juga beragam. Hal ini menunjukkan kecerdasan pengemasan politik oleh PKS. Capaian ini didukung oleh kader PKS yang sebagian besar berpendidikan tinggi.

#### Perbaikan Nasib

Capaian di atas bukannya tanpa kekurangan dan tantangan. PKS masih mendapatkan stigma negatif dari sebagian kalangan. Kalangan liberal menganggap PKS terlalu Islamis. Kalangan Islamis menganggap PKS mulai liberal. PKS mesti memperbaiki nasib ke depan dengan strategi jitu.

Dilema ini penting segera diselesaikan dan dikomunikasikan terhadap berbagai kalangan. Kasus-kasus kecil juga selalu diangkat misalnya cap PKS Wahabi, anti tahlilan, dan lain-lain. Beberapa kalangan kecil masih mencurigai agenda Islamisasi PKS dan menyangsikan genealogi ke-Indonesia-an PKS. Hal inilah tantangan PKS ke depan yang mesti dijawab tuntas. PKS mesti mampu membumikan ideologi, gagasan, dan ide-idenya dalam konteks ke-Indonesiaan.

PKS akan kembali diuji untuk mengoptimalkan peluang pada Pemilu 2017. Signifikansi hasil Pemilu 2015 akan diperhitungkan parpol lain. Massa dan kader PKS yang jelas dan loyal menjadi daya tawar dalam koalisi.

PKS juga dituntut semakin memacu diri dalam modernisasi demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui intelektualisasi politisinya dan pendidikan politik publik. Modal PKS adalah memiliki kader dengan kadar intelektual tinggi. Sejatinya politik adalah industri pemikiran yang bertugas memberi arah bagi kehidupan masyarakat (Matta, 2013).

PKS mesti tampil terdepan dengan teladan politisinya yang selalu memproduksi gagasan intelektual agar menghasilkan pemikiran jitu menyelesaikan persoalan bangsa. Alfian (2013) menyarankan agar politisi

membuka diri dan bekerja sama lebih erat dengan para intelektual agar terbentuk pola intelektualisasi politik yang mandiri dan kreatif.

Tantangan selanjutnya yang mesti dijawab adalah membumikan gagasan PKS melalui aplikasi pendidikan politik. Pendidikan politik yang tidak optimal menyebabkan publik banyak buta politik. Seorang penyair Jerman bernama Bertolt Brecht menegaskan bahwa buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Dinamika politik terkini menguji efektifitas strategi PKS. Konsisten menjadi oposan memberikan konsekuensi pada minimnya sumber daya yang direngkuh. Namun belajar dari PDIP dan Gerindra yang menjadi oposan selama 10 tahun, justru berbuah manis sebagai jawara pemilu 2014.

Keunggulannya PKS yang tidak mengandalkan figur dan mengoptimalkan peran kader akan berpotensi mengantarkannya menjadi partai besar. Hal ini akan terjadi ketika kelak partai-partai lain kehilangan tokoh, gagal melakukan regenerasi, dan berkuat pada pusaran konflik. Kuncinya PKS mesti menghindari godaan korupsi, konflik internal, dan membumi dengan kemajemukan bangsa (Lupiyanto, 2016)

Sebagai upaya mempertahankan pencitraan partai, PKS berkomitmen mengaktualisasikan prinsip dasar partainya sebagai partai dakwah dan kader dalam konteks tantangan Indonesia yang semakin kompleks.

Tantangan PKS adalah bagaimana prinsip dasar partai bisa teraktualisasi, sehingga dibutuhkan kerja keras dari internal PKS untuk mengaktualisasikan prinsip dasar tersebut, dalam konteks tantangan Indonesia. PKS sebagai partai dakwah tidak bisa bekerja sendiri dan akan menjalin kerja sama dengan semua pihak. Baik di tingkat regional maupun internasional.

Diusianya yang sudah memasuki 20 tahun, PKS terus menunjukkan eksistensinya dan tumbuh menjadi partai besar dan diperhitungkan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga mendatangkan tantangan/rintangan yang besar pula berupa fitnah dan konspirasi. Hal itu wajar karena ada pihak-pihak yang terganggu dengan eksistensi PKS yang semakin diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air.

Diera digitalisasi, menyampaikan pendapat menjadi sangat terbuka terutama melalui media sosial. Bahkan medsos sering dijadikan ajang saling serang berbagai pihak yang berseberangan. Kader PKS harus lebih dewasa dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan politik ke depan. Begitu juga harus dewasa saat bermedsos.

#### **4.3. Perbaiki Citra Partai**

Partai Keadilan Sejahtera memasuki babak baru dengan terpilihnya struktur kepemimpinan baru pada tanggal 10 Agustus 2018. Pengurus baru memiliki harapan untuk membesarkan kembali partai dakwah ini. Dan memperbaiki citra partai yang selama ini merosot, Apalagi PKS beberapa kali dihantam kasus suap dan dugaan korupsi.

Sebagai partai dakwah yang berbasis kader, PKS sejak awal terus melakukan upaya agar prinsip partai dakwah dapat diaktualisasi. Ini merupakan tantangan terbesar bagi kepemimpinan yang baru ini, yaitu bagaimana PKS dapat mengaktualisasi partai dakwah ini dalam konsep Islami. PKS harus dapat berimprovisasi dan berinovasi agar nilai-nilai Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, terlebih dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

PKS tidak dapat bekerja sendirian. PKS akan menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, baik dengan pemerintah, parpol lain, maupun elemen lain di dalam negeri atau di luar negeri. PKS memiliki cita-cita menjadi partai dakwah yang akan melayani bangsa. Seperti yang ada dalam AD/ART PKS, yaitu bersih, peduli, dan profesional.

Sukses kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera merupakan momentum yang ditujukan untuk mengubah citra partai. Pengurus PKS sadar elektabilitas partai berlambang bulan dan padi itu semakin anjlok setelah beberapa kadernya terjerat kasus korupsi.

Saat ini mereka berusaha mengubah *mindset* publik bahwa kepemimpinan yang baru ini lebih Islami ketimbang yang sebelumnya. Karena kepemimpinan saat ini dipimpinnya dari kubu yang berbeda.

Pengurus PKS saat ini didominasi oleh faksi keadilan ketimbang faksi sejahtera. Faksi keadilan dalam PKS adalah orang-orang yang masih menganut

paham lama. Orientasi faksi keadilan ini adalah mendirikan partai yang orientasinya pada dakwah Islam. Sedangkan faksi sejahtera adalah orang-orang yang berorientasi politis pragmatis.

PKS sedang melakukan politik pencitraan dengan mengubah struktur pimpinan yang berasal dari faksi keadilan. Mengembalikan orientasi menjadi partai dakwah yang terlepas dari politik pragmatis. Selagi berada di luar pemerintahan, PKS saat ini sedang mengembalikan arah dakwahnya, setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi akibat terlalu bermain dengan politik pragmatis, saat ini, PKS berusaha mengubah citra menjadi partai dakwah, seperti konsep Partai Keadilan pada awal berdirinya.

Sebelumnya, beberapa kader PKS terjerat korupsi. Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq terjerat kasus korupsi suap impor daging. Yang terbaru, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, tersangka kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan (Heryanto, 2015).

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan para kader PKS tersebut menjadi beban tersendiri bagi upaya pencitraan partai. PKS hendaknya mengakhiri perseteruan dengan KPK, dan tidak lagi menghalang-halangi KPK untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan mobil, bila hal ini tidak dihentikan, maka dikhawatirkan akan berimplikasi negatif pada citra PKS dalam proses Pilgub dan Pemilu caleg.

Semakin pelik perseteruan, maka akan semakin menarik perhatian publik. Sehingga pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan terbangun persepsi dibenak public, bahwa PKS adalah partai yang dekat dengan persoalan korupsi., Karena sejauh ini publik mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK dari pada kepada partai politik. Sehingga pemilih akan mulai berpikir dua kali untuk memilih PKS dan para calegnya saat pemilihan nanti.

#### **4.4. Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera**

Terkait Pilgub Jabar 2018, sejumlah partai pengusung bakal calon mulai untuk menyusun strategi dan program pemenangan. Tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mulai memanas mesin partainya untuk memenangkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikh.

Meskipun PKS ini sudah ini menguasai Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir dengan mengusung Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jabar selama dua periode, namun belum menjadi jaminan akan terulang lagi bagi pasangan Ajat-Syaikhu. PKS pun tetap dituntut untuk bekerja keras agar bisa kembali memenangkan gelaran pemilihan gubernur. Semua kader PKS bergerak secara sistematis meningkatkan popularitas dan elektabilitas Sudrajat-Syaikhu.

Salah satu strategi PKS untuk memenangkan Pilgub Jabar 2018 yaitu dengan mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal Sudrajat dan Syaikhu. Sudrajat didorong untuk lebih inten bersosialisasi di wilayah Priangan, sementara Syaikhu akan dioptimalkan di wilayah pantura. Sudrajat menilai kesuksesan Ahmad Heryawan. Dengan kekuatan tersebut optimis Sudrajat-Syaikhu mampu memenangi Pilgub Jabar

Sebagai partai politik yang mengusung calon gubernur di Pilgub Jawa Barat tahun 2018, PKS menggunakan berbagai strategi pencitraan untuk mendapatkan kemenangan. salah satunya adalah dengan mengerahkan seluruh anggota legislatifnya.

Saat ini PKS memiliki 120 anggota legislatif di 27 di kabupaten/kota dan 12 anggota legislatif di tingkat provinsi dan dengan kekuatan entitas politik tersebut maka PKS akan berupaya meneruskan kepemimpinan di Jawa Barat.

Workshop Fraksi PKS tingkat kabupaten/kota dan provinsi ini adalah sebagai upaya mengintegrasikan Pilgub Jabar dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. Sebab, dinamika dan situasi politik saat ini pasti berbeda. Mengintegrasikan ini tidak mudah. PKS mencoba merancang dari sekarang biar tetap selaras. Sementara itu, Ketua Fraksi DPRD Jawa Barat Nur Supriyanto menekankan, workshop fraksi ini sebagai aksi cepat tanggap dalam merespons hasil Rakorwil DPW PKS Jabar. Fraksi PKS DPRD Jabar telah membentuk desk pilkada untuk melaksanakan tugas khusus yang diamanatkan dalam Rakorwil.

Selain menggenjot peran anggota legislatif, dalam workshop tersebut, PKS juga akan mengundang sejumlah tokoh dari luar partai untuk memberikan pandangannya terkait dinamika dan situasi politik saat ini. PKS akan



menggunakan kaca mata orang lain dulu, setelah itu baru memakai kacamata sendiri agar punya gambaran yang utuh.

Partai Keadilan Sejahtera DPD Depok telah menyiapkan sederet strategi pemenangan untuk menyisihkan beberapa nama yang kerap disebut sebagai lawan berat. Salah satunya, memperhitungkan pergerakan Ridwan Kamil. Bakal calon Wakil Gubernur Jabar Ahmad Syaikhul Mufidun menyampaikan sejumlah bocoran yang akan diterapkan mesin politiknya pada Pilgub Jabar 2018.

Strategi pertama adalah membentuk tim pemenangan wilayah (TPW). Depok merupakan daerah yang ke-18. Upaya keliling Jabar yang dilakukan Sudrajat-Syaikhul Mufidun, bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar tingkat popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat.

Selain itu, PKS juga telah menggalang kekuatan di ranah media social, namun hal yang terpenting adalah dengan terjun langsung ke lapangan, yakni dengan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. medsos tidak bisa diandalkan begitu saja. Perlu ada hal-hal yang bisa langsung dilihat masyarakat. Syaikhul Mufidun juga membidik pemilih milenial, yang menurutnya, harus dibimbing dan diedukasi. Ada lebih dari 2.000 kader yang hadir saat ini dan siap mendukung pasangan yang telah dititipkan pimpinan pusat. Depok termasuk kota yang punya jumlah kader banyak. PKS *breakdown* sampai ke RT dan RW.

PKS sendiri dalam pemilu lebih mengandalkan pendekatan persuasif. Yaitu setiap anggota Partai PKS di tiap wilayahnya membagikan brosur-brosur ke masyarakat setempat atau langsung ngobrol secara personal. Dan itu menurut PKS dipandang efektif. (wawancara dengan M Alimul Hakim)

Selain itu PKS juga menggunakan strategi untuk menaikkan elektabilitas Sudrajat-Syaikhul Mufidun dengan melancarkan "serangan udara". Ada tiga strategi, yang pertama konsolidasi kader. Jadi kader ronda, kader jaga TPS, dan ajak masyarakat berhasil, ini serangan darat. Serangan udara kita menang di media sosial. Media sosial di H-7 digempur habis. H-7 kita merajai media sosial. Lalu *endorser* kepada 'Asyik' luar biasa. Memang kami berharap apa pun, siapa pun yang menang selamat. Tapi kami melihat fakta realitas, makin menemukan strategi yang tepat untuk ganti presiden di 2019.

Iklan dan promosi program-program dan agenda kegiatan partai PKS, untuk sekarang lebih mengandalkan media social sosial. Seperti: facebook, twitter dan akun sosial media lainnya. Jadi setiap kader minimal harus mempunyai satu akun facebook untuk menyebarkan informasi-informasi terkait program PKS. Selain untuk media promosi dan iklan, bisa juga untuk dijadikan sebagai pencitraan partai PKS (Wawancara dengan M Alimul Hakim).

#### **4.5. Membangun Koalisi dengan Partai Lain**

Hampir semua partai berupaya untuk mendapatkan kemenangan untuk calon yang diusung dalam Pilkada Jawa Barat termasuk juga Partai keadilan sejahtera. Bila PKS berhasil memenangi Pilkada Jawa Barat dan meraih 60% kemenangan dalam Pilkada 2018, Partai keadilan sejahtera akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dalam Pemilu 2019 mendatang.

Prinsip komunikasi atau kerjasama PKS dengan partai lain yaitu dengan jalan *musyarokah ijabiyah albana*, musyarokah artinya koalisi atau kerja sama, ijabiyah artinya pandangan positif, dan albana artinya konstruktif, dan nilai-nilai dasar dari partai PKS ini, bekerjasama dalam hal kebaikan dengan siapapun, dengan partai sekuler sekalipun, bahkan dengan partai komunis sekalipun kalau memang ada hal yang bisa dikerjakan bersama-sama. Sebetulnya PKS membuka komunikasi seluas-luasnya, PKS serius dalam hal ini, karena dari dulu PKS ini persatuan ukhuwah.

Keseriusan PKS ini dibuktikan dengan jalinan hubungan koalisi dengan beberapa partai lain. Koalisi di sejumlah daerah dilakukan dalam rangka menjaga hubungan yang telah dibangun antara PKS, Gerindra, dan PAN sejak gelaran Pilpres tahun 2014. Secara umum ada kesepakatan bahwa kebersamaan akan terus dijaga di antara ketiga partai ini dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, Prabowo menyatakan, masing-masing partai koalisi masih menyaring beberapa nama untuk diusung di Pilkada yang telah disepakati untuk berkoalisi. PKS dan Gerindra setidaknya telah bersepakat mendukung Sudirman Said di Pilgub Jateng. Namun di Jawa Barat belum ada kecocokan calon. DPW PKS Jabar sampai saat ini masih memilih mendukung Ahmad Syaikhul sebagai

calon wakil gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar. Di sisi lain, Gerindra telah mendeklarasikan Sudrajat sebagai calon gubernur Jabar.

Baik Gerindra maupun PKS dan PAN memang wajib berkoalisi di Pilgub Jabar dan Jateng, untuk memenuhi jumlah kursi atau perolehan suara yang disyaratkan agar bisa mengajukan calon kepala daerah. Di Pilgub Jabar, misalnya, partai atau gabungan partai harus menguasai 20 persen atau 20 kursi dari total kursi di DPRD. Gerindra saat ini menguasai 11 kursi, PKS 12 kursi dan PAN 4 kursi.

Meski ada kesepakatan berkoalisi di lima daerah, Prabowo menyampaikan koalisi partainya dengan PKS dan PAN tetap memberi ruang bagi masing-masing partai untuk berjalan sendiri di beberapa Pilkada. Pasalnya, setiap daerah memiliki perbedaan dinamika politik (CNN, 2017)

Menjelang Pilgub Jabar 2018, Tiga partai resmi mendukung pasangan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat dan Muhammad Syaikhul untuk Pilkada Jawa Barat 2018. Tiga partai tersebut yakni, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Amanat Nasional ( PAN). Keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang Nomor 82, Jakarta Selatan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berhalangan hadir karena tengah berada di luar kota. Jabar memiliki jumlah pemilih yang luar biasa besar, yakni 18 persen dari total pemilih nasional. Usai mengambil keputusan tersebut, Sohibul langsung menghubungi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin. Ia merasa lega karena respons Amir sebagai politisi senior sangat dewasa dan memahami keputusan PKS untuk mendukung Sudrajat-Syaikhul.

Adapun sebelumnya, PKS sempat digadang-gadang akan mendukung Deddy Mizwar bersama dengan Demokrat. Di samping itu, ia juga menghubungi Deddy Mizwar. Gerindra-PKS-PAN Kembali Mesra, Polarisasi Politik 2014 Bisa Terulang) Sohibul memastikan, hubungan PKS, khususnya dirinya, dengan Deddy Mizwar tetap terjalin dengan baik meski PKS pada akhirnya memutuskan untuk mengusung calon lain. Deddy Mizwar juga menyikapi dengan sangat dewasa, penuh pengertian bahwa politik sangat dinamis. Rencana tiga partai untuk

berkoalisi di lima Pilkada telah disampaikan beberapa waktu lalu. Lima daerah tersebut yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Sumatra Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Maluku Utara (Malut).

Berita Terkait Koalisi PKS, Gerindra, dan PAN Diharapkan Berlanjut ke Pemilu 2019 Pilkada Jakarta Buat PKS, Gerindra, dan PAN Solid Koalisi di Daerah Lain PKS, Gerindra, dan PAN Sepakat Koalisi Pilkada 5 Provinsi, Termasuk Jabar dan Jateng. Gerindra, PKS, dan PAN Akan Bertemu Bahas Koalisi Pilkada 3 Provinsi Prabowo Lobi PKS Duetkan Sudrajat-Syaikhu di Pilgub Jabar (Kompas, 2017)

Partai Keadilan Sejahtera juga memperluas koalisi untuk memperkuat upaya pemenangan pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Gerindra dan PKS, sudah membangun koalisi dan masing-masing dipersilahkan untuk memperluas cakupan koalisinya. langkah ini sebagai upaya menyikapi adanya poros baru yang digagas Gerindra bersama partai lainnya. PKS sebenarnya bertemu dengan beberapa partai politik, namun tidak di publikasikan. Contohnya, ketika bertemu dengan Partai Demokrat dan PAN. Ke depan PKS akan berkomunikasi lebih intensif untuk membentuk koalisi besar dalam kemenangan pilkada Jabar.

PKS tidak mengungkapkan atau menyebut pertemuan itu sebagai poros baru. Akan tetapi sebagai perluasan untuk memperkuat poros yang sudah ada. Koalisi yang sudah terjalin saat ini, yakni Gerindra dan PKS. Gerindra mengusung Deddy Mizwar dan PKS mengusung Ahmad Syaikhu. Adanya poros baru merupakan dinamika politik pada tataran atas. Namun, segala keputusan tetap berada pada pimpinan tertinggi partai yakni Prabowo Subianto dan Salim Segaf Aljufri. Pimpinan partai ini tetap berkomitmen untuk mengusung Deddy Mizwar berpasangan dengan Ahmad Syaikhu. surat keputusan (SK) bersama pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu memang belum ada. SK akan dikeluarkan sehingga legalitas sebagai kandidat akan lebih kuat.

Demokrat, PKS dan PAN bergabung dalam koalisi zaman now. Ketiga partai tersebut sepakat mengusung pasangan Deddy Mizwar - Ahmad Syaikhu meski belum diresmikan dalam bentuk surat keputusan bersama.

PKS masih menunggu keputusan lanjutan dari koalisi reuni. Koalisi zaman now tetap berjalan sampai ada keputusan dari DPP. Semua peluang memungkinkan untuk itu sambil menunggu pengumuman DPP. Koalisi reuni memang belum membicarakan pasangan calon. Sehingga, bukan tidak mungkin mendukung pasangan Deddy Mizwar Ahmad Syaikhul atau muncul pasangan baru.

Saat ini koalisi zaman now sudah sampai pada tahap teknis persiapan deklarasi pasangan Demiz - Syaikhul. Namun, persiapan yang sudah dilakukan ini tak akan berlanjut apabila keputusan DPP mengusung calon berbeda. PKS secara teknis menyiapkan tim deklarasi untuk mengukuhkan calon yang sudah ada. Tapi kalau beda akan tetap mengikuti keputusan DPP.

Sebelumnya, Partai Gerindra, PAN, dan PKS, sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Serentak 2018 di 5 provinsi. Ketiga partai tersebut sepakat berkoalisi di Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Namun ketiga partai tersebut masih menunda untuk bekerjasama di Pilgub Jabar.

Untuk pengusungan Calon Gubernur Jawa Barat terjadi pembatalan, Deddy Mizwar yang rencana sebelumnya diusung oleh PKS, PAN dan Demokrat ternyata mentah lagi karena ada partai yang tidak menyetujuinya. Deddy Mizwar menyampaikan tak percaya informasi pembatalan dukungan DPD Partai Gerindra, Dia masih memegang komitmen ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bakal Calon Gubernur Jawa Barat

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengunggah pakta integritas antara Deddy Mizwar dan Partai Demokrat melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid. Pakta integritas yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2017 tersebut diduga menjadi penyebab utama PKS batal mendukung Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat 2018. Di mana, PKS lebih memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra yang besar kemungkinan juga akan diikuti PAN mengusung Mayjen (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhul.

Pakta Integritas tersebut point 3 jelas menyebutkan tentang komitmen Demiz untuk gerakan mesin Partai untuk memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg

diusung oleh Partai Demokrat. PKS menghormati pilihan politik Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

Berikut isi pakta integritas Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat tersebut: yaitu; 1) Siap menjadi anggota partai Demokrat dan ditempatkan di struktur partai. 2) Siap menjadi calon gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023 dan memenangkannya serta menggerakkan mesin partai termasuk biayanya. 3) Siap menggerakkan mesin partai untuk memenangkan presiden/wakil presiden yang diusung partai Demokrat tahun 2019-2024. 4) Siap menerima arahan partai koalisi. Di Pilkada Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar didukung Partai Demokrat dan PAN. Namun besar kemungkinan PAN juga akan meninggalkan Deddy Mizwar untuk bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS. Meski demikian, Deddy Mizwar disebut-sebut berpeluang akan digandeng Partai Golkar untuk diduetkan dengan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar 2018.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meninggalkan Partai Demokrat dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat atau pilgub Jabar 2018. Mereka kini memilih berjalan bersama Gerindra dan Partai Amanat Nasional mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhul dalam pilgub Jabar.

Sebelumnya, PKS bersama Demokrat akan mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhul. Ketua Umum PKS Sohibul Iman mengatakan telah menyampaikan keputusan partainya itu ke Demokrat dan Deddy. Ia menyebutkan keduanya legowo dan menghormati keputusan PKS.

PKS tetap berhubungan baik dengan Demokrat dan Deddy. Meski tak berkoalisi dengan Demokrat di Jawa Barat, kedua partai itu telah sepakat bekerja sama dalam pilgub Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Selain PKS, Gerindra, dan PAN, partai-partai lain juga telah mengumumkan calon gubernurnya dalam pilgub Jabar 2018. Partai Golkar menyodorkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi; Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem menjagokan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil; sedangkan Partai Demokrat memilih Deddy Mizwar.

Partai Keadilan Sejahtera dan Parta Gerindra telah membentuk sebuah koalisi menjelang Pilgub Jabar 2018. Meski demikian, PKS Jabar yakin bahwa

PAN dan Partai Demokrat akan segera bergabung dengan koalisi mereka. PKS siap membangun komunikasi yang intens dengan sejumlah partai untuk membangun koalisi dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang. PKS yakin bangunan koalisi akan semakin besar, karena peluang masuknya PAN dan Partai Demokrat. Koalisi PKS dengan Partai Gerindra memang cukup untuk mengusung pasangan, namun semakin banyak partai yang bergabung, tentu semakin besar peluang untuk berhasil. Retaknya koalisi PKS-Gerindra yang mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhul karena PKS masih tetap berpegang kepada komitmen Prabowo.

Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, partainya bersama Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) optimistis pasangan calon gubernur Sudrajat-Ahmad Syaikhul menang dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. PKS optimistis menang walaupun belum ada hasil survey yang signifikan. Tapi itu biasa karena saudara Sudrajat baru masuk gelanggang. PKS punya endorser Pak Prabowo dan Pak Aher.

Partai koalisi PKS-Gerindra-PAN mengandalkan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akrab dengan sapaan Aher untuk mendongkrak elektabilitas Sudrajat-Syaikhul. Survey terakhir dengan dukungan beliau berdua itu ada 65 persen warga Jawa Barat akan menyetujui Sudrajat-Ahmad Syaikhul.

Survey konsultan politik Poolmark melansir ada tiga nama yang menjadi endorser yang akan memengaruhi suara pemilih dalam pilkada yakni Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, serta Aher khusus di Jawa Barat. Dua orang ini (Prabowo dan Aher) meng-endorse kepada satu pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhul. Sementara endorser dari Jokowi sekitar 35 persen itu diperebutkan oleh kedua pasangan lain.

Alasan dukungan Prabowo dan Aher itu yang membuat mereka yakin pasangan yang disongkong partai koalisinya menang. Jokowi terlihat mendorong ke Golkar juga sedang mendorong PDIP. Jadi yang 35 persen itu sedang diperebutkan berdua. Sementara yang 65 persen hanya ke satu calon.

Prabowo akan diupayakan menjadi juru kampanye andalan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikh. Berapa titiknya itu akan disesuaikan dengan keadaan. Akan disiapkan ratusan juru kampanye dari tiap partai pengusung.

Ada ratusan juru kampanye yang sudah disiapkan daftarnya. Anggota dewan, pengurus DPP masing-masing partai, anggota Dewan asal Jawa Barat, pejabat publik di hari cuti mereka, juga banyak dari kelompok islam diantaranya mujahid Alumni 212 akan bersama-sama (Wijaya, 2018)

#### **4.6. Kriteria Calon Kepala Daerah Partai Keadilan Sejahtera**

Setiap partai politik tentunya memiliki standar tersendiri dalam menentukan calon Kepala Daerah sesuai dengan platform dan kebutuhan politis partai. Partai keadilan sejahtera diantaranya yang menerapkan kriteria calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2018.

Ketua Tim Pemenangan PKS Wilayah Jabar Haris Yuliana punya formula pasangan ideal pilgub di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia itu. Ada tiga poin yang harus dipenuhi pasangan ideal di PilgubJabar 2018. Pertama, pasangan yang terbentuk harus memiliki basis massa yang berbeda dan saling mengisi. Perbedaan basis massa harus dimiliki pasangan cagub cawagub karena luasnya wilayah Jawa Barat. Cagub cawagub yang terbentuk harus mewakili lebih dari 1 basis massa, misalnya basis perkotaan dan pedesaan, atau konfigurasi priangan-pantura. Misalnya Ridwan Kamil yang dianggap cukup memiliki basis di perkotaan, mungkin akan mencari pasangan yang memiliki basis kuat di pedesaan atau bisa juga berasal dari daerah pantura. Sementara DediMulyadi akan mencari pasangan yang kuat di kota.

Poin kedua yaitu harus memenuhi perbedaan latar suku. Pasangan cagub cawagub yang terbentuk harus memperhatikan komposisi demografi. Data menunjukkan suku Sunda di Jawa Barat sangat dominan, hampir 74%, Jawa sekitar 11%, Betawi 5,33%. Sehingga cagub yang bukan berlatar belakang sunda misalnya, sebaiknya mencari pasangan yang berlatar belakang Sunda. Begitu juga sebaliknya.



Poin ketiga adalah cagub cawagub yang 'dikawinkan' haruslah memiliki komunikasi yang baik dengan legislatif. Cagub atau cawagub yang memiliki pasangan berlatar belakang legislatif, akan menjadi poin plus di mata pemilih. Jika gubernur adalah eksekutif, maka keberhasilan menjalankan janji dan visi misi membutuhkan kerjasama yang baik dengan legislative atau DPRD Provinsi (Yuliani, 2018).

Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mendukung Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhul sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Meski nama Sudrajat baru muncul belakangan ini, Ketua Umum PKS Sohibul Iman yakin ia bisa memenangkan pertarungan pemilihan gubernur Jawa Barat.

Sohibul mengatakan di tanah Sunda dikenal empat syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang jika hendak menjadi pemimpin Jawa Barat. Syarat-syarat itu adalah nyunda, nyakola, nyantri, dan nyantika.

'Nyunda' berarti orang Sunda asli. Memang beliau ini asli Sunda dan perilakunya nyunda bener. Selain itu, rakyat Jawa Barat menginginkan pemimpinnya mempunyai pendidikan yang baik (nyakola). Sudrajat dianggap memenuhi kriteria ini lantaran telah mengecap pendidikan tinggi dan karier yang moncer saat menjadi tentara.

Sudrajat juga merupakan sosok yang religius (nyantri). Meski tidak pernah mencicipi bangku pesantren, dikenal dekat dengan kalangan ulama. Adapun kriteria terakhir, yaitu nyantika yang berarti memiliki tata ramadhan sopan santun. Sudrajat memenuhi syarat ini, dengan modal empat ini, dalam waktu dekat akan bisa dapatkan elektabilitas.

Upaya mendongkrak elektabilitas Sudrajat menjadi pekerjaan rumah bagi koalisi PKS, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Sebab, nama Sudrajat baru muncul dan kalah cepat dibandingkan tokoh-tokoh lain yang beredar sejak lama (Tempo, 2017).

Sudrajat memenuhi kriteria sebagai cagub Jabar. Selain keturunan asli Jabar, Sudrajat memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, dekat dengan kalangan ulama, hingga berperilaku santun. Sebelum memutuskan berkoalisi

dengan Gerindra dan PAN mengusung Sudrajat dan Syaikh, PKS berencana mengusung Deddy Mizwar bersama dengan partai Demokrat.

Sudrajat memiliki potensi yang lebih baik ketimbang Deddy Mizwar. Potensi Sudrajat akan terlihat seiring dengan proses Pilkada berlangsung. Deddy Mizwar memang potensinya sangat bagus, tapi Sudrajat juga punya potensi yang luar biasa. PKS yakin dapat meningkatkan elektabilitas bakal cagub Jabar Sudrajat.

Beberapa hal yang akan dilakukan PKS untuk meningkatkan elektabilitas Sudrajat, yakni dengan melakukan kampanye di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar. Sudrajat perlu memperkenalkan kembali sosoknya di hadapan masyarakat Jabar agar elektabilitasnya meningkat. Sudrajat harus bicara di panggung agar masyarakat mengenalnya.

## **BABV**

### **MEDIA RELATIONS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

#### **5.1. Citra Partai keadilan sejahtera di Media**

Sebagai salah satu partai dengan pendukung terbesar di Indonesia, Partai keadilan sejahtera memiliki citra yang relatif stabil. Hal ini diindikasikan dari eksistensi partai tersebut setelah mengalami beberapa guncangan namun mereka mampu menjaga citra organisasi dengan baik. Media-media mainstream menampilkan partai berlambang beringin ini dari berbagai sudut; melalui figur dan tokohnya, program-programnya hingga pandangan serta kebijakan politik makro dan mikro.

Pasang-surut citra di media bagi sebuah organisasi, terlebih organisasi politik adalah sesuatu yang lumrah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana organisasi tersebut mempertahankan eksistensinya dan hal ini berkaitan erat dengan strategi komunikasi politik mereka dalam membangun hubungan baik dengan media sehingga tetap mendapat pandangan yang positif dalam opini publik. Bagaimanapun, citra sebuah organisasi banyak memiliki kaitan erat dengan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Pada umumnya landasan citra berakar dari nilai-nilai kepercayaan yang diberikan secara individual dan merupakan pandangan atau persepsi dari publik.

Membangun citra menjadi sebuah keharusan bagi sebuah organisasi atau perusahaan sebab sebagaimana ditekankan oleh Canton yang dikutip oleh Ardianto & Soemirat (2005: 111) bahwa citra merupakan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan (atau organisasi); kesan yang sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Dengan begitu, citra dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari pengalaman yang diperoleh, kepercayaan yang dimiliki, perasaan yang dialami, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan layanan yang disampaikan kepada konsumen dapat memengaruhi persepsi publik terhadap citra.

Secara teoretik, citra perusahaan adalah persepsi yang berkembang dalam benak publik (mengenai realitas yang terlihat) dari sebuah perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, citra pada dasarnya bersifat dinamis dan tidak lahir

begitu saja, melainkan dapat merupakan respon atau feedback dari publik atas eksistensi sebuah organisasi atau perusahaan. Satu hal yang perlu dipahami sehubungan dengan terbentuknya citra perusahaan adalah adanya persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi stimulus ke dalam suatu gambaran dunia yang menyeluruh. Stimuli adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indra. Secara sederhana, persepsi adalah pandangan seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan informasi yang diterimanya.

Di sisi lain, kehadiran media sebagai instrument yang memenuhi kebutuhan informasi publik menjadi faktor yang sangat kuat dalam mengarahkan persepsi publik tersebut sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa informasi yang diterima publik melalui media tertentu akan berhubungan erat dengan citra sebuah organisasi atau perusahaan yang menjadi materi informasi tersebut.

Dengan demikian, pemberitaan tentang suatu perusahaan atau organisasi pada dasarnya merupakan bagian dari pembentukan citra organisasi atau perusahaan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pemberitaan di media terkait dengan skandal perpecahan Partai keadilan sejahtera tahun 2016 dan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum telah berakibat pada menguatnya ketidakpercayaan publik para partai berlambang pohon beringin ini dan tentu saja berujung pada terpuruknya citra Partai keadilan sejahtera di mata publik.

Kondisi ini memaksa Partai keadilan sejahtera untuk kembali membangun strategi komunikasi politik melalui pembentukan kembali citra mereka agar kembali mendapatkan kepercayaan publik. Buruknya citra banyak disebabkan oleh identitas yang juga tidak begitu baik. Selamat yang dikutip oleh Sutojo (2004:13) mengatakan identitas perusahaan adalah apa yang senyatanya ada pada atau yang ditampilkan oleh perusahaan sehingga secara mendasar identitas menampilkan jati diri perusahaan, sementara citra adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri tersebut.

Identitas bukanlah citra tetapi dapat membantu perusahaan atau organisasi mengingatkan masyarakat tentang citra mereka. Namun demikian, identitas merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembentukan citra perusahaan di masyarakat. Identitas perusahaan yang baik dan kuat merupakan prasyarat membangun citra baik perusahaan di kelak kemudian hari. Hal itu disebabkan karena seperti halnya dalam kehidupan orang perorangan, identitas perusahaan membentuk kesan pertama. Padahal kesan pertama dapat memengaruhi persepsi orang perorangan atau organisasi selanjutnya. (Sutojo, 2004: 18).

Semakin lama publik mengenal baik sebuah perusahaan atau organisasi (antara lain melalui identitas perusahaan) semakin besar kemungkinan mereka bersikap positif terhadap perusahaan atau organisasi itu. Oleh karena itu, identitas yang baik dan kuat menjadi prasyarat untuk membangun citra yang baik di masyarakat, tidak sedikit perusahaan berusaha keras untuk menciptakan atau memperbaharui identitas mereka secara profesional.

Oleh sebab itu, proses membangun citra positif merupakan bagian yang paling penting dari Public Relations Politik dalam kasus Partai keadilan sejahtera. Dalam menghadapi krisis yang dialami oleh Partai keadilan sejahtera, fungsi PR menjadi sangat vital untuk memulihkan citra sebab sebagaimana dipaparkan oleh Nova (2011: 49) bahwa fungsi utama PR adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga organisasi.

## **5.2. Strategi Partai keadilan sejahtera dalam Memelihara Hubungan Positif dengan Media**

Dalam era media seperti sekarang ini, *image war* (perang citra) menjadi sesuatu yang lumrah. Semua organisasi berlomba-lomba mencitrakan diri mereka sebagai sesuatu yang positif di mata publik. Pencitraan dengan demikian menjadi aset

tersendiri bagi sebuah lembaga, perusahaan dan organisasi untuk membangun citra positifnya agar mendapat dukungan dan simpati dari publik.

Kesadaran akan kuatnya posisi dan peran media dalam proses membangun citra positif juga berdampak pada strategi pencitraan yang dilakukan oleh Partai Golkar di media dengan cara membangun hubungan yang baik dengan media. Secara praktis dalam kasus Partai keadilan sejahtera, membangun citra positif dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut:

*Pertama*, Partai keadilan sejahtera memilih segmen dengan cara memilih kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting bagi tumbuh dan berkembangnya eksistensi mereka di masa yang akan datang. Kelompok-kelompok masyarakat itu disebut kelompok sasaran atau konstituen. Secara terus menerus, Partai keadilan sejahtera wajib mengusahakan agar seluruh konstituen mereka mempunyai persepsi yang positif terhadap jati diri, identitas dan reputasi Partai Keadilan Sejahtera.

Upaya ini diyakini dapat berdampak pada penyusunan program pembangunan citra partai secara lebih terarah. Dengan menentukan segmen-segmen masyarakat yang dijadikan sasaran program pembentukan citra, Partai keadilan sejahtera juga dapat berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang lebih efektif. Dalam banyak hal pemilihan segmen sasaran juga lebih memudahkan Partai keadilan sejahtera dalam memilih jalur yang akan dipergunakan untuk berkomunikasi dengan mereka.

Langkah *kedua* adalah riset publik sebagai sarana memilih kelompok sasaran. Riset dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang bersangkutan dengan apa yang disukai dan tidak disukai publik terhadap Partai keadilan sejahtera sebagai organisasi politik dan kebijakan-kebijakannya. Disamping itu juga, dihasilkan informasi yang bersangkutan dengan apa yang disukai dan tidak disukai publik terhadap organisasi politik lainnya.

Setelah diketahui sejumlah informasi berdasarkan riset yang dilakukan, Partai Golkar kemudian membangun relasi dengan media-media tertentu sebagai saluran informasi baru sehingga mampu menyebarkan kembali gagasan mereka kepada konstituen dan publik secara umum. Hal ini dilakukan dengan beberapa

kegiatan seperti press release, press conference dan advokasi atas sejumlah kasus yang mereka alami.

Langkah *ketiga* adalah dengan melakukan segmentasi kelompok sasaran. Perusahaan dapat membagi kelompok sasaran utama menjadi beberapa segmen. Segmentasi sasaran ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi dalam konteks pencitraan positif mereka sehingga informasi data dikategorisasikan berdasarkan sasaran. Memberikan penerangan kepada publik melalui pendekatan komunikasi persuasif, membujuk secara langsung untuk mengubah sikap dan tindakan merupakan upaya dan langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Dengan upaya demikian, diharapkan upaya membangun citra baik Partai Keadilan Sejahtera dapat terwujud tanpa mengalami banyak kesulitan dan mampu memperbaiki citra mereka.

### **5.3. Pemanfaatan Media Sosial dalam Membentuk Opini Calon Kepala Daerah**

Kemunculan media sosial menjadi sebuah kekuatan baru berbasis publik, bukan hanya korporasi atau organisasi tertentu. Tidak terkecuali, popularitas media sosial telah menyebabkan aktivitas humas organisasi dan partai politik pun turut menyesuaikan diri untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pembangunan citra positif mereka. Phillips and Young (2009) memaparkan alasan mengapa humas harus memahami dan media sosial. Di era yang semakin berubah ini, pekerjaan humas tidak lagi sama sehingga pendekatan dan strategi yang digunakan oleh seorang PRO pada sebelumnya, tetapi harus disesuaikan dengan media yang paling populer, yakni media sosial.

Internet dan media sosial telah mempermudah kegiatan PR yang kemudian populer dengan sebutan digital PR atau cyber PR. Secara teknis, aktivitas cyber PR biasanya menggunakan beberapa fitur internet seperti E-mail, blog, media sosial yang salah satunya adalah Twitter. Hidayat (2014: 103) mengungkapkan bahwa dalam kegiatan PR, Twitter dapat dipergunakan untuk menyampaikan tawaran, memberikan informasi atau menghubungkan para pembaca dengan tautan-tautan yang berisi informasi-informasi penting.

Salah satu alasan teknisnya tergambar dari paparan Ling (2004: 139) bahwa media sosial hampir sama dengan mobile phone yang mampu menciptakan fenomena yang disebutnya sebagai “*hyper-coordination*,” yakni koordinasi yang lebih dari sebelumnya diantara sesama pengguna. Serupa dengan telepon seluler, sosial media dapat digunakan dalam cara yang paling ekspresif dan lebih emosional. Para pengguna tidak hanya dapat mengirim dan menerima pesan melaluinya, tetapi juga dapat membangun dan membentuk komunitas, membagikan informasi dan merepresentasikan dirinya sesuai yang dia inginkan (Fakhruroji, 2015: 237).

Secara teoretis, Fuchs (2014) mengawali pembahasan tentang media sosial dengan menguraikan perkembangan Web 2.0 yakni teknologi yang telah melibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, saling mengolah dan melengkapi data, web sebagai platform atau program yang dapat dikembangkan, sampai pada pengguna dengan jejaring dan alur yang sangat panjang. Dalam web atau jejaring komputer (internet) terdapat sebuah sistem hubungan antarpengguna yang bekerja berdasarkan teknologi komputer yang saling terhubung satu sama lain. Keterhubungan antarpengguna ini juga sekaligus membentuk semacam jejaring layaknya masyarakat global secara offline lengkap dengan tatanan; nilai, struktur, sampai pada realitas sosial. Fuchs (2014: 44) menyebut konsep ini sebagai *techno-social system*, yakni sebuah sistem sosial yang terjadi dan berkembang dengan perantara sekaligus keterlibatan perangkat teknologi.

Beberapa ahli mengajukan definisi media sosial. Boyd (2009) misalnya menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan saling berkolaborasi dalam permainan atau semacamnya. Masih senada, van Dijk (2013) mendefinisikan media sosial sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang mampu memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Oleh sebab itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Itulah sebabnya salah satu kekuatan media sosial adalah sifatnya yang memungkinkan pengguna untuk menjadi pengaya konten sehingga



media sosial seolah-olah menjadi gambaran sempurna dari evolusi atas praktik komunikasi bermedia.

Pemanfaatan media sosial bagi kepentingan politik memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun demikian, salah satu contoh yang paling populer adalah ketika tim pemenangan Barrack Obama menggunakan Facebook dan media sosial lainnya untuk membangun citra Obama sebagai orang yang diidam-idamkan rakyat Amerika Serikat. Banyak pihak mengamini bahwa kemenangan Obama didukung oleh tim media sosialnya yang begitu solid dan kreatif dalam membentuk citra positif.

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang strategi branding image Partai keadilan sejahtera melalui Twitter. Seperti diketahui, Twitter merupakan layanan social networking yang berbentuk mikroblog yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim, membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter yang kemudian dikenal dengan istilah tweet. Sejak didirikan pada Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet. Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai sarana proses, pembelajaran, media komunikasi darurat, hingga kampanye politik.

Twitter dipandang memiliki komunikasi yang konstan karena bekerja selama 24 jam 7 hari dengan potensi target publik di seluruh dunia. Selain itu, Twitter juga memiliki respon yang cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan balasan dari informasi yang disampaikan. Sama dengan jenis cyber PR yang lainnya, Twitter juga bertujuan untuk menumbuhkan, memupuk dan membangun hubungan yang dinamis.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh WeAreSocial pada tahun 2017 merupakan media sosial terpopuler di setelah Youtube dan Facebook. Penentuan Twitter dilakukan dengan beberapa alasan teknis antara lain; Twitter merupakan media sosial yang terkategori pada mikroblog dan bersifat lebih “serius” ketimbang Youtube maupun Facebook. Cuitan pemegang akun Twitter lebih sering dijadikan sebagai rujukan informasi resmi ketimbang yang lainnya.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1. Simpulan**

Membangun kebersamaan di internal PKS diperlukan adanya tokoh yang memiliki kesadaran untuk mempersatukan partai dengan tidak melihat faksi-faksi lagi, bahkan berupaya untuk mempersatukan faksi-faksi yang telah bercerai berai. Kemunculan faksi-faksi menjadi bibit perpecahan di tubuh partai dan berdampak pada menurunnya elektabilitas partai

Menurunnya elektabilitas partai perlu dibangun kekompakan, bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga PKS dapat kembali meraih kejayaannya. Munaslub merupakan momentum yang menjadi titik konsolidasi untuk melakukan sharing dengan tetap menerapkan azas keterbukaan.

Saluran komunikasi di internal partai keadilan sejahtera secara formal sudah di wadahi atau ditangani oleh bidang Informasi dan Komunikasi, namun bidang ini hanya memberikan informasi secara umum, sedangkan terkait dengan hubungan interpersonal, para kader dan pengurus PKS menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka, serta aturan norma yang sesuai dengan tingkatan atau level kader atau pengurus. Komunikasi di internal PKS perlu dibenahi dan dikondisikan, terutama informasi bagi kalangan internal, sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman sehingga akan memicu opini buruk di kalangan internal dan konstituen Partai keadilan sejahtera.

PKS sebagai partai peninggalan Orde Baru, yang telah mentasbihkan diri sebagai partai reformasi, tentu perlu menjaga citranya dengan melakukan perubahan-perubahan orientasi yang lebih kerakyatan. Bukti nyata hasil kerja nyata akan menjadi poin tersendiri untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat, namun apabila PKS tetap saja tidak merubah praktik politik yang selalu pragmatis tersebut, maka PKS tidak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan jangan berharap akan jaya lagi seperti masa lalu.

Semenjak ketua umum PKS tersandung kasus e-KTP, tidak lama kemudian PKS juga menjadi partai yang elektabilitasnya terus menurun, sedangkan saat ini justru PKS sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilukada serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Persoalan tersebut menjadi beban tersendiri bagi PKS untuk mendongkrak citra partai, bagaimanapun citra partai akan sangat berhubungan dengan elektabilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap Partai keadilan sejahtera.

Kontestasi Pilkada 2018 menjadi momen positif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Partai keadilan sejahtera harus memanfaatkan sebaik mungkin kontestasi pilkada karena partai berlambang pohon beringin ini terseret kasus dugaan korupsi KTP-E, PKS perlu selektif dalam menjaring calon kepala daerah. Calon kepala daerah harus memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Salah satunya dengan tidak mencalonkan figur yang terjerat kasus hukum.

Sebagai partai yang sudah mapan dengan kepemilikan sumber daya manusia yang cukup, maka Partai keadilan sejahtera memiliki nilai tawar yang dapat diperhitungkan untuk setiap pengusungan calon kepala daerah . kekuatan daya tawar Partai keadilan sejahtera menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon kepala daerah. Penarikan dukungan PKS terhadap Ridwan Kamil, menandakan bahwa PKS tidak mau disepelkan dengan permintaan kompensasi atas dukungannya.

Salah satu persyaratan bagi calon kepala daerah yang diusung Partai keadilan sejahtera yaitu diminta kesiapan dan kesediannya untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024. Persyaratan itu pula yang membuat PKS sulit untuk memutuskan duet Dedi Mulyadi dengan Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat, karena Deddy Mizwar merupakan kandidat yang diusulkan oleh Partai Demokrat yang belum tentu akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Strategi pencitraan yang dilakukan oleh Partai Gokar di media dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan media. Secara praktis dalam kasus Partai keadilan sejahtera, membangun citra positif dilakukan dalam

beberapa langkah diantaranya adalah; *Pertama*, Partai keadilan sejahtera memilih segmen dengan cara memilih kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting bagi tumbuh dan berkembangnya eksistensi mereka di masa yang akan datang. *kedua* adalah melakukan riset publik sebagai sarana memilih kelompok sasaran dan langkah *ketiga* adalah dengan melakukan segmentasi kelompok sasaran. Segmentasi sasaran ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi dalam konteks pencitraan positif mereka sehingga informasi data dikategorisasikan berdasarkan sasaran.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mendorong aktivis PKS untuk memanfaatkan teknologi Internet dan media social (E-mail, blog, media sosial ataupun Twitter). Media tersebut dimanfaatkan PKS untuk kepentingan sosialisasi ataupun pembentukan opini public, dengan pemanfaatan media tersebut, PKS akan lebih mudah melihat reaksi khalayak terhadap para calon kepala daerah yang diusung oleh Partai keadilan sejahtera.

## **6.2. Rekomendasi**

Partai politik merupakan aset penting bangsa, karena partai politik merupakan kendaraan politik bagi orang yang akan berkuasa di negeri ini. Kekuasaan harus lahir dari partai yang memiliki kredibilitas dan integritas moral yang bagus dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Pertumbuhan partai politik harus mendapatkan pengawasan dan koreksi dari masyarakat, sehingga memiliki citra positif di masyarakat. Penelitian tentang partai keadilan sejahtera ini bermaksud memberikan kontribusi berupa saran yang bersifat teoritis dan praktis dan diharapkan dapat berguna.

Penelitian tentang Strategi *Public Relations*, masih terbuka kemungkinannya untuk ditindak lanjuti dengan tinjauan dari aspek ataupun objek partai yang lain, karena ranah kajian *Public Relations* ini begitu luas, sehingga masih banyak aspek-aspek lain yang belum tersentuh. Penelitian *Public Relations* partai politik ini penting dan perlu untuk ditindak lanjuti, karena perubahan pencitraan suatu partai politik akan diikuti oleh perubahan pandangan masyarakat

terhadap suatu partai politik, dan pada akhirnya akan berimbas pada elektabilitas partai politik tersebut.

Eraproduksi citra seperti sekarang ini, setiap partai politik hendaknya memiliki keberanian untuk melakukan pembaharuan dan berupaya menjaga citra positif, dengan tetap menjaga diri dari penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para fungsionaris dan kader partai, sehingga partai-partai tersebut akan memiliki nilai tawar di mata konstituen. Bagi Partai keadilan sejahtera semangat pembaharuan partai yang telah dicetuskan mulai tahun 1988, perlu dijaga dan terus dikoreksi sosialisasi dan implementasinya, berupaya untuk benar-benar berubah dan tidak kembali lagi menjadi partai yang berkarakter Orde Baru.

Pencitraan partai keadilan sejahtera hendaknya dilakukan dengan menunjukkan kesalehan struktural dan kesalehan kultural, yakni kesalehan yang ditunjukkan dalam kegiatan organisasi partai dan kesalehan yang ditunjukkan dalam perilaku kader secara individu dalam komunitas masyarakatnya, untuk menumbuhkan kepercayaan dan simpati masyarakat, maka PKS harus membuktikannya dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan perilaku terpuji yang harus selalu ditunjukkan oleh kader-kader PKS. Potensi-potensi yang selama ini dimiliki PKS tidak akan banyak berarti dalam masyarakat, apabila tidak ditunjang dengan i'tikad baik dan moralitas kadernya.

Demokratisasi sebagai bagian agenda pembaharuan PKS hendaknya diterapkan secara konsisten, sudah saatnya Partai keadilan sejahtera berupaya secara serius menghapuskan praktek-praktek politik uang dalam berbagai agenda pemilihan para pimpinannya mulai tingkat pusat sampai daerah. Apabila PKS masih tetap terbelenggu dengan kepentingan politik instant, hanya mengejar jabatan dan uang, maka PKS akan kembali jatuh ke dalam kubangan pragmatisme, yang justru akan menghancurkan eksistensinya yang selama ini dipertahankan dan diperjuangkan dengan susah payah. PKS harus belajar menghadapi realitas politik dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat, PKS mestinya mendahulukan kepentingan rakyat dari pada mendahulukan kepentingan jabatan dan partainya.

Menurunnya elektabilitas partai perlu dibangun dengan kekompakan, bekerja bersama-sama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kontestasi Pilkada 2018 menjadi momen positif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Partai keadilan sejahtera harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin kontestasi pilkada ini, mengingat partai berlambang pohon beringin ini telah menghadapi banyak persoalan yang berpotensi menurunkan elektabilitasnya.

Sebagai partai yang responsif dan berakar, maka PKS harus peka terhadap dinamika masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama kalangan bawah. PKS harus hadir setiap masyarakat membutuhkan, sehingga akan timbul kepercayaan dan simpati masyarakat yang akhirnya mereka akan memilih Partai keadilan sejahtera dalam Pemilu 2019.

## DAFTARPUSTAKA

- A. Bloomsbury Reference Book. 2004. *Negotiate Sccessfully*. London: Bloomsbury Publishing.
- Abdullah, Irwan. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Aivanni, Nur 2017. Saatnya PKS Perbaiki Citra dan Dongkrak Elektabilitas. Diakses tanggal 8 Pebruari 2018 dari <http://mediaindonesia.com/news/read/131648/saatnya-pks-perbaiki-citra-dan-dongkrak-elektabilitas/2017-11-12>
- Akbar, Aprillio 2017. Dukungan DPD Pada Setnov Perburuk Citra PKS, diakses Tanggal 9 Pebruari 2018, dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20170723/15/673955/dukungan-dpd-pada-setnov-perburuk-citra-pks>.
- Almond, Gabriel and G Bingham Powell. 1976 *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Company  
*Among Five Traditions*. London: SAGE Publications
- Ardianto, Elvinaro. Soemirat, Soleh. 2005. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Rosda
- Ari, 2017. Akbar Tanjung Sebut Munaslub Cara Efektif Kembalikan Citra PKS, diakses Tanggal 6 Pebruari 2018 dari <https://news.okezone.com/read/2017/11/19/337/1816569/akbar-tanjung-sebut-munaslub-cara-efektif-kembalikan-citra-pks>
- Ariefana, Pebriansyah dan Dian Rosmala 2018. Begini Syarat Calon Kepala Daerah Jika Ingin Didukung PKS, diakses 6 Pebruari 2018 dari Suara.com.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Persepektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Aritonang, Burhanudin dan Muslim Hutasuhut (ed.). 2003. *AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai keadilan sejahtera*. Jakarta: DPP Partai keadilan sejahtera dan Pustaka Pergaulan.
- Bainus, A. (2017). Kepemimpinan-di-jawa-barat. Diakses tanggal 15 September 2015. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3501623/pilgub-jabar-2018-pks-target-hatrick>
- Basrowi dan Sukidin, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekian.
- Berger, P. L. dan T. L. (1990). Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang sosiologi Pengetahuan (Terjemahan) (LP3S). Jakarta.
- Bertrand L. Alvin 1967. *Basic sociology: an introduction to theory and Methode*. New York: Apleton Century Crofts
- Budhiana, Nyoman. 2017. Pilkada Jadi Momentum Perbaiki Citra PKS. Diakses Tanggal 7 Pebruari 2018 dari <http://www.mediaindonesia.com/news/read/125023/pilkada-jadi-momentum-perbaiki-citra-pks/2017-10-01>.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Combs, James E & Dan Nimmo, 1981. *A Primer of Politik*. New York: Macmillan Publishing Company.  
COSMOS Corporation
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing*
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. (ed). 1994, *Handbook of Qualitative Research*. New Delhi India: Sage Publications. Inc.
- Effendy, Onong Uhyana. 1986. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya
- Fakhruroji, Moch. Mediatization of religion in “texting culture”: self-help religion and the shifting of religious authority,” *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 5, Number 2, December 2015: 231-254. DOI: 10.18326/ijims.v5i2.231-254*
- Firman, N. (2007). Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Studi Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies*, 14(3).
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuchs, Christian. 2008, *Internet and Society: Social Theory in the Information Age*, London: Routledge
- Giddens, Anthony and Jonathan Turner. 2008. *Social Theory Today*. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Dawah Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal Of Indonesian Islam*, 6(1).
- Henry, M Kailola. 2018. Tingkatkan-Kebersamaan-dan-Soliditas-Partai-PKS-Hadapi-Pilkada-Serentak, 22 Juli 2017 dari <http://m.suarakarya.id/detail/43041/>
- Hiadayat, Deddy N. 1999. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, VolIII*. Jakarta: IKSI dan ROSDA.
- Hidayat, Deddy N. 1999. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian komunikasi dalam Jurnal ISKI, VolIII*. Jakarta: IKSI dan ROSDA.
- Kaid, Lynda Lee & Christina Holtz-Bacha, 2008. *Encyclopedia of Political Communication*. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication.
- Kholil, Makrum. 2009. *Dinamika Politik Islam PKS di Era Orde Baru*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kompas.com. (2016). resmi.deklarasikan.dukungan.untuk.jokowi.pada.pilpres.2019. diakses 1 Maret 2018. <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/21064041/PKS.resmi.deklarasi.kan.dukungan.untuk.jokowi.pada.pilpres.2019>
- Littlejohn, S. W., & Foss., K. A. (2009). *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication*, Edisi 9, tej. Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Selemba Humanika.



- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2008. *Theories of Humman Communication*, Ninth Edition. Belmont USA: Thomson Wardsworth.
- McNair, Brian. 2003. *An Intriduction to Political Communication*. New York - London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Qualitatif Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, Lexy.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, Yahya. 1993. *Persoalan-Persoalan Pembangunan Politik dan Demokratisasi di Indonesia*. dalam M.Amien Rais (penyunting). "*PKS dan Demokratisasi di Indonesia*". Yogyakarta: PPSK
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli, 2017, *Etnografi Virtual*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nova, Firsan. 2011. *Crisis Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurdin, A. A. (2011). Democratic Experiences In Recruiting FirmanMembers And Leaders. *Journal Al-Jamiah*, 49(2).
- Oliver, David. 2006. *How to Negotiate Effectively*. Second edition. London and Philadelphia: Kogan Page
- Pace, R. Wayne and Don F. Faules, 1998. *Komunikasi organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Terjemahan Deddy Mulyana, Bandung: Rosda Karya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS
- Phillips, David dan Young, Philip. 2009, *Online Public RelationsA practical guide to developing an online strategy in the world of social media*, second edition, (London – Philadelphia: Kogan Page Limited)
- Poloma, M. . . (2000). *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roni, Heriyandi. 2006. *Demokratisasi Internal Partai keadilan sejahtera Pasca Orde Baru (1998-2004)*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2002. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sihombing, Emrus, 2017. Diakses tanggal 8 Pebruari 2017, dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/09/06/ovua18-PKS-harus-benahi-masalah-internal-secepatnya>
- Soemarno AP. 2002. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto, 2005. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Soemirat, Soleh dkk, 2000. *Komunikasi Persuasif*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdiknas.
- Sudewo, Alief. 2006), *Partai keadilan sejahtera di Era Reformasi: Strategi dalam Menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta
- Sutojo, Siswanto. 2004. *Membangun Citra Perusahaan*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Tandjung, Akbar. 2007. *The PKS Way: Survival Partai keadilan sejahtera di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics and Democratization in Indonesia: PKS in The pos Soeharto-era*. New York: Routledge.
- Utomo, S., & Turtiantoro. (2013). Analisis Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Memperebutkan Kursi di DPRD Kabupaten Batang. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(2).
- Van Dijk, Jan. 2003, *Network Society*, London: SAGE Publications
- Wahyu, Yohan. 2017. Bertahan Bersama Beban Partai. Diakses tanggal 8 Pebruari 2018, dari, <https://indonesia.kompas.com/20170918/281526521227853>
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wisnu AJ, 2018. Menakar Elektabilitas Partai Lewat Pilgub 2018, diakses tanggal 10 Pebruari 2018 dari <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menakar-elektabilitas-partai-lewat-pilgub-2018/500654/2018/02/07>
- Yin, Robert K. 1989. *Case Study Research Design and Methods*. Washington: